

Faktor Penentu Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

Tahun 2011 – 2015

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Nurhayati

Nomor Mahasiswa : 13313172

Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

2015

**Faktor Penentu Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia
Tahun 2011 – 2015**

SKRIPSI



Disusun Dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Strata 1
Jurusan Ilmu Ekonomi, Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Nurhayati

Nomor Mahasiswa : 13313172

Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

2015

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Februari 2017

Penulis,



Nurhayati

PENGESAHAN

FAKTOR PENENTU INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2011 - 2015

Nama : Nurhayati
Nomor Mahasiswa : 13313172
Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 6 Febuari 2017

Telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,



Moh.Bakti Hendrie Anto, SE.,M.Sc

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

FAKTOR PENENTU INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2011-2015

Disusun Oleh : **NURHAYATI**

Nomor Mahasiswa : **13313172**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 21 Maret 2017

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Moh.Bekti Hendrie Anto, SE., M.Sc.

.....

Penguji : Agus Widarjono, SE., MA.,Ph.D

.....

Heri Sudarsono, SE.,MEc

.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

*"Barang Siapa Keluar untuk Mencari Ilmu Maka dia berada di
jalan ALLAH".*

(HR. Turmudzi)

Boleh Jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu.

Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan Kamu tidak Mengetahi".

(Al-Baqarah:216)

Man Jadda Wa Jadda "Barang siapa yang bersungguh – sungguh akan
mendapatkannya".

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada Allah S.W.T yang telah memberikan saya kesabaran dalam menyelesaikan amanah dalam pembuatan skripsi ini.
2. Kepada Papa dan Mama Saya yang telah mendoakan , memberikan motivasi dan memberikan nasehat-nasehat yang sangat berarti dalam hidup saya.
3. Kepada Abang dan Adik saya yang selalu memberikan saya semangat dan motivasi
4. Kepada semua sahabat saya yang selalu ada di saat saya terpuruk mampu menghibur saya.
5. Kepada M. Bagas Jati.P yang selalu ada buat saya disaat saya butuhkan
6. Dan buat semua orang yang menyayangi dan mencintai saya.



KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena atas karunia ilmu, rahmat serta hidayahnya skripsi dengan judul **“Faktor Penentu Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Tahun 2011 – 2015”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia yaitu Ad-Din Al-Islam yang senantiasa kita harapkan syafa’atnya didunia dan diakhirat.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Bapak Mohammad Bakti Hendrie Anto,,S.E., M.Sc. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan dorongan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. Dwipraptono Agus Harjito, M Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Akhsyim Afandi, MA.Ec., Ph.D. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Kedua Orangtua tercinta, Papa (Rusman Salam) dan Mama (Milli Hasyim), terimakasih atas semua doa yang sudah terucap, kasih sayang serata perhatian yang luar biasa, saya ucapkan banyak terimakasih.

5. Terimakasih kepada Saudara Laki – laki yaitu Abang (Afriansyah) dan Adik (Robby Salam) yang telah membantu menyemangatin dan mendoakan saya Terimakasih.
6. Kepada Sahabat saya “Meva Wirma” dan Orang yang berarti di Hidup saya sekarang “Bagas” yang telah membantu saya, dan Keluarga “Marching Band Universitas Islam Indonesia” Stage 32 dan “Belengers” yang telah menyemangatin pembuatan skripsi ini
7. Teman – teman “KKN BY – 317” Sastra Kelana, Satriyo Bimantoro, Muhammad Idamansyah, Rahmad Arifan Hr, Putri Nurul Hidayah, Aryani Puspitasari, dan Siti Hamida. Terima kasih atas segala support dan semangatnya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman bersama kalian. Sukses untuk kita.
8. Serta semua pihak yang tidak mungkin kami sebut satu per satu, tanpa bermaksud untuk mengurangi rasa terimakasih penulis kepada kalian semua

Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatupun yang sempurna kecuali Allah SWT, begitu pun dengan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis mengharap kritik serta saran agar dapat menjadikan pembelajaran bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya. Dan harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 9 Febuari 2017

Nurhayati

NIM : 13313172

Abstrak

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu Negara atau Wilayah dalam bidang pembangunan manusia (BPS, 2012). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari tiga komponen yang terdiri dari Kesehatan, Pendidikan, dan Standar hidup. Pembangunan kesehatan dan pendidikan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah variabel independen yang terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto, Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk pendidikan, Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Kesehatan, dan Tingkat Keislaman (Ibadah Haji) memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia tahun 2011 – 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan data runtut waktu (*time series*) lima tahun dari tahun 2011 – 2015 dan *cross section* sebanyak tiga puluh tiga (33) Provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB dan APBD untuk kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan APBD untuk Pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM dan Tingkat Keislaman berpengaruh terhadap IPM.

Kata kunci : Indeks Pembangunan Manusia, PDRB, APBD untuk Pendidikan dan Kesehatan, Tingkat Keislaman.

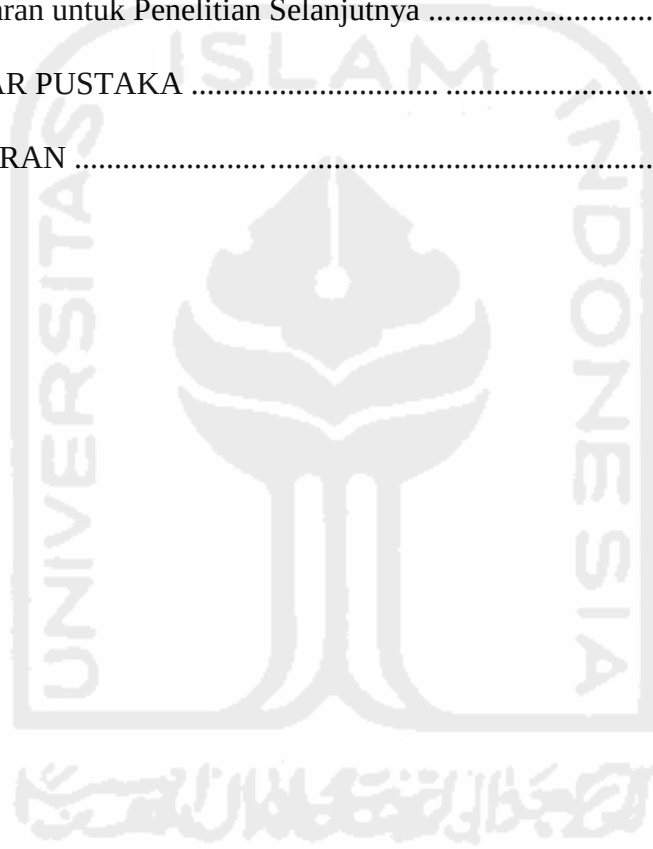
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II: KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Kajian Pustaka.....	12
2.2 Landasan Teori	16
2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia	16
2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	22
2.2.3 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Kesehatan	32
2.2.4 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Pendidikan.....	35

2.2.5 Tingkat Keislaman (Ibadah haji)	41
2.5 Hipotesis Penelitian	50
BAB III: METODE PENELITIAN	51
3.1 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional	51
3.1.1 Variabel Penelitian	51
3.1.2 Definisi Operasional	51
3.2 Jenis dan Sumber Data	54
3.3 Metode Penelitian	55
3.3.1 <i>Pooled Least Square (PLS) atau Metode Common</i>	56
3.3.2 <i>Fixed Effect model (FEM)</i>	57
3.3.3 <i>Random Effect Model</i>	58
3.4 Pemilihan Model	59
3.4.1 Uji LM Test	59
3.4.2 Uji Hausman Test	60
3.4.3 Uji Signifikansi Common Effect Vs Fixed effect	60
3.5 Pengujian Statistik	61
3.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)	61
3.5.1 Uji F	62
3.6.3 Uji T	63
BAB IV : HASIL DAN ANALISIS	64
4.1 Deskripsi Data Penelitian	64
4.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	64
4.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	65

4.1.3 Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Kesehatan	67
4.1.4 Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Pendidikan	67
4.1.5 Tingkat Keislaman (Ibadah Haji)	69
4.2 Hasil dan Pembahasan	70
4.3 <i>Common Effect, Fixed Effect, Random Effect dan Model Estimasi</i>	
<i>Fixed Effect dan Random Effect</i>	71
4.3.1 Model <i>Common Effect</i>	71
4.3.2 Model <i>Fixed Effect</i>	73
4.3.3 Model <i>Random Effect</i>	75
4.4 Pemilihan Model	80
4.4.1 Uji F-statistik (chow test)	80
4.4.2 Uji Hausman	81
4.4.3 Model Estimasi Random Effect	84
4.4 Uji Hipotesis	85
4.4.1 Koefisien determinasi (R^2)	85
4.4.2 Uji F-statistik	85
4.4.3 Uji t Statistik	86
4.5 Interpretasi Hasil Analisis	86
4.5.1 Pengaruh PDRB terhadap IPM	86
4.5.2 APBD untuk Kesehatan terhadap IPM	87
4.5.3 APBD untuk Pendidikan terhadap IPM	87
4.5.4 Tingkat Keislaman	88
4.6 Pembahasan	88

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Keterbatasan Penelitian	96
5.3 Saran	97
5.3.1 Saran untuk Pemerintah	97
5.3.2 Saran untuk Penelitian Selanjutnya	97
DAFTAR PUSTAKA	xvi
LAMPIRAN	xvii

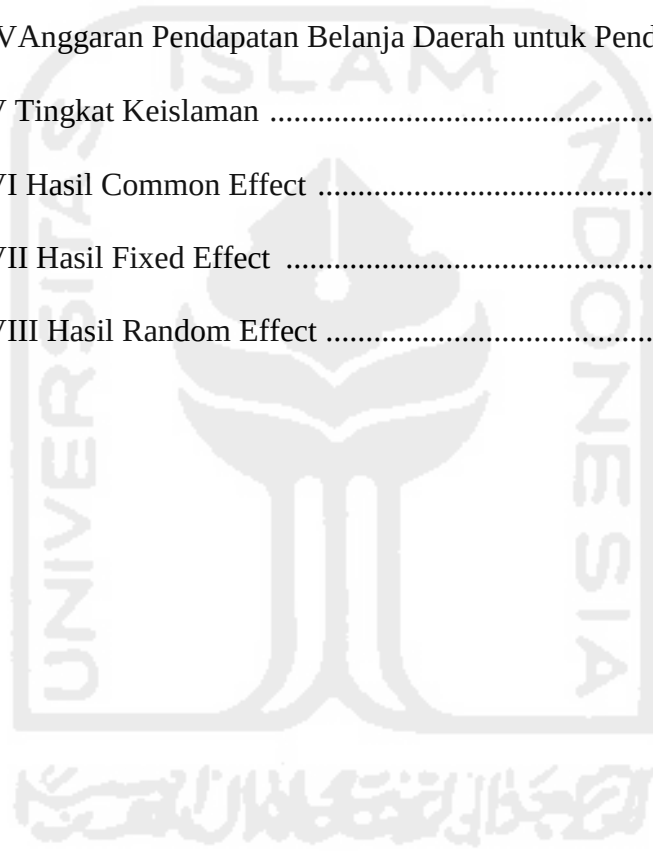


DAFTAR TABEL

1.1 Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM.....	20
1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi	29
1.3 Belanja Pemerintah menurut Fungsi Pendidikan 2007 – 2013	23
3.1 Hasil <i>Common Effect</i>	72
3.2 Hasil <i>Fixxed Effect</i>	74
3.3 Hasil <i>Randome Effect</i>	76
3.4 Hasil Uji Chow	77
3.5 Hasil Hausment Test	82
3.6 Hasil pengujian Signifikan Random Effect	80
4.12 Hasil Estimasi Fixed Effect.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Indeks Pembangunan Manusia	86
Lampiran II Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia	87
Lampiran III Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Kesehatan	88
Lampiran IV Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Pendidikan	89
Lampiran V Tingkat Keislaman	90
Lampiran VI Hasil Common Effect	91
Lampiran VII Hasil Fixed Effect	92
Lampiran VIII Hasil Random Effect	94



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu Negara atau Wilayah dalam bidang pembangunan manusia (BPS,2012). Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk (Andaiyani,2012). Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk.

Ada pun tiga indikator tersebut yaitu: indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan ekonomi. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik tercermin dari lamanya rata-rata penduduk bersekolah, angka melek huruf dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi yaitu pengeluaran riil perkapital. Indonesia memiliki tiga puluh empat (34) provinsi tentunya akan memberikan gambaran mengenai pembangunan manusia yang bervariasi.

Menurut Lumbantoruan (2012) Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup sedangkan kualitas on fisik melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf. Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat ternyata semakin membaik selama dua dekade terakhir, meskipun laju perbaikannya relatif tertinggal dibanding dengan Negara tetangga. Ketimpangan Pembangunan Manusia di Indonesia ternyata cenderung

semakin mengecil. Pada tahun 2011 Indeks Pembangunan Manusia kawasan Sumatera, Jawa dan Bali pada umumnya berada di atas rata-rata Nasional (72,77). Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia Kawasan di luar Jawa, Sumatera dan Bali (Indonesia Tengah, Kalimantan Timur) pada umumnya di bawah rata-rata Nasional kecuali Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Sementara itu, daerah tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua juga telah mengalami kemajuan tingkat Indeks Pembangunan Manusia yang lebih pesat dibanding daerah lainnya.

Pembangunan Manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal. Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian adalah: pertama, banyak Negara berkembang termasuk Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan. Kedua, banyak Negara maju yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi masalah-masalah sosial, seperti : penyalahgunaan obat, aids, alkohol, gelandangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, beberapa Negara berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena mampu menggunakan secara bijaksana semua sumberdaya untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia. (UNDP, 1990) dikutip dari (Bhakti Nadia, 2012).

Pertumbuhan Ekonomi harus dikombinasikan dengan pemerataan hasil-hasilnya. Pemerataan kesempatan harus tersedia, baik semua orang, perempuan maupun laki - laki harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan

dan pelaksanaan keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pembangunan Manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan.

Perkebangan pembangunan manusia di Indonesia, seperti disebutkan dalam "*Indonesia Human Development Report 2004*". Sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi dari awal tahun 1970-an sampai akhir 1990-an, pertumbuhan ekonomi memungkinkan penduduk untuk mengalokasikan pengeluaran untuk Pendidikan dan Kesehatan menjadi lebih banyak. Sementara itu pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan relatif sedikit. Sampai dengan tahun 1996 tingkat pembangunan manusia regional cukup mengagumkan seperti tampak dari kurangnya kemiskinan dan membaiknya tingkat harapan dihidup dan melek huruf (BPS–Bappenas–UNDP,2001). Namun pencapaian tersebut segera mendapatkan tantangan ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997. Akibatnya krisis ekonomi tidak satu provinsipun tidak mengalami penurunan Indeks Pembangunan Manusia kembali mengalami perbaikan maupun menyamai tingkat Indeks Pembangunan Manusia tahun 1996.

UNDP membedakan tingkat Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan tiga klasifikasi yakni: *low* (Indeks Pembangunan Manusia kurang dari 50), *lowe-medium* (Indeks Pembangunan Manusia antara 50 dan 65,99), *upper-medium* (Indeks Pembangunan Manusia antara 66 dan 79,99) dan *high* (Indeks

Pembangunan Manusia 80 keatas). Indeks Pembangunan Manusia regional Indonesia termasuk kategori menengah ke bawah (*lower-medium*) sampai menengah ke atas (*upper-medium*). Tahun 2006 indeks pembangunan manusia regional tingkat menengah ke bawah masih diduduki Provinsi Papua, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ketiga Provinsi ini termasuk regional dengan rasio penduduk miskin tertinggi di Indonesia.

Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintah dalam rangka menjalankan ke-tiga peran yang ada maka tentunya diperlukan pula dana yang besar sebagai bentuk pengeluaran segala kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan ketiga peran tersebut. Pengeluaran pemerintah ini merupakan konsekuensi dari berbagai kebijakan yang diambil dan diterapkan melalui ketiga peran tersebut.

Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Kebijakan pemerintah dalam tiap pembelian barang dan jasa menggunakan pelaksanaan suatu program mencerminkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor - sektor publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam kaitannya yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan diharapkan investasi pada sektor ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan mengurangi ke miskin.

Pembangunan Kesehatan dan Pendidikan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia, Kesehatan dan Pendidikan adalah salah satu komponen utama selain pendapatan. Kesehatan serta pendidikan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Studi Rodric (lihat Meierdan,2000) diikuti oleh (Patta,2012) menemukan bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak buruk juga pada pembangunan manusia suatu daerah.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Manusia dalam peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang produktif. Menurut Mankiw (2008), pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia.

Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada periode 2011–2015 adalah 67 keatas dalam satuan persen menempati urutan keempat diantara sebelas Negara–negara anggota ASEAN. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan posisi Indonesia dalam urutan keempat.

Namun Indeks Pembangunan Manusia di 33 Provinsi di Indonesia masih mengalami perbedaan yang signifikan (BPS,2012). Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara.

Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada periode 2011–2015 adalah (67.09), (67.70), (68.31) dan (68.90) dalam satuan persen menempati urutan keempat di antara sebelas Negara–negara anggota ASEAN. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan posisi Indonesia dalam urutan keempat. Namun Indeks Pembangunan Manusia di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi di Indonesia masih mengalami perbedaan yang signifikan. (BPS,2012).

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, *United National Development Programme* (UNDP) telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu Negara. Konsep Indeks Pembangunan Manusia menurut UNDP dan Badan Pusat Statistik (BPS,2012) mengacu pada pengukuran pencapaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup:

1. Angka harapan hidup untuk mengukur pencapaian dibidang Kesehatan.
2. Angka melek huruf dan rata-rata lama Sekolah untuk mengukur pencapaian dibidang Pendidikan.

3. Standar kehidupan yang layak yang di indikasikan dengan logaritma normal dari produk domestik regional bruto perkapital penduduk dalam peoritas daya beli.

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan – permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahananpangan dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah pencapaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspik pembangunan lainnya gagal. Dari latar belakang inilah maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“FAKTOR - FAKTOR PENENTU INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2011 - 2015”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Produks Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2011–2015?
2. Apakah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2011–2015?
3. Apakah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2011–2015?

4. Apakah Tingkat Keislaman (Ibadah Haji) yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2011–2015?

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Pembangunan merupakan cara pandang terhadap suatu persoalan pembangunan dalam arti pembangunan baik sebagai proses maupun sebagai metode untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan rakyat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi – provinsi Indonesia tahun 2011–2015.
2. Untuk menganalisis pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi–provinsi Indonesia tahun 2011 – 2015.
3. Untuk menganalisis pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi–provinsi Indonesia tahun 2011– 2015.
4. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Keislaman (ibadah Haji) yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi–provinsi Indonesia tahun 2011 – 2015.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan menambahkan pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

2. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini merupakan syarat wajib bagi penulis dalam menyelesaikan studi, maka penulis mengadakan penelitian yang diharapkan mampu memberikan informasi dan penambahan wawasan bagi pihak - pihak terkait dengan permasalahan ekonomi, dengan demikian diharapkan dapat menentukan kebijakan dengan tepat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan Pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini bertisi tiga bagian: pertama, berisi pendokumentasian dan pengakjian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. Kedua, mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori ini berisi teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori-teori yang didapat akan menjadi landasan bagi penulisan untuk melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan mengenai judul yang penulis pilih. Ketiga, merupakan formalisasi hipotesis. Hipotesis ini dipandang sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah, sehingga hipotesis yang disusun adalah merupakan pernyataan yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

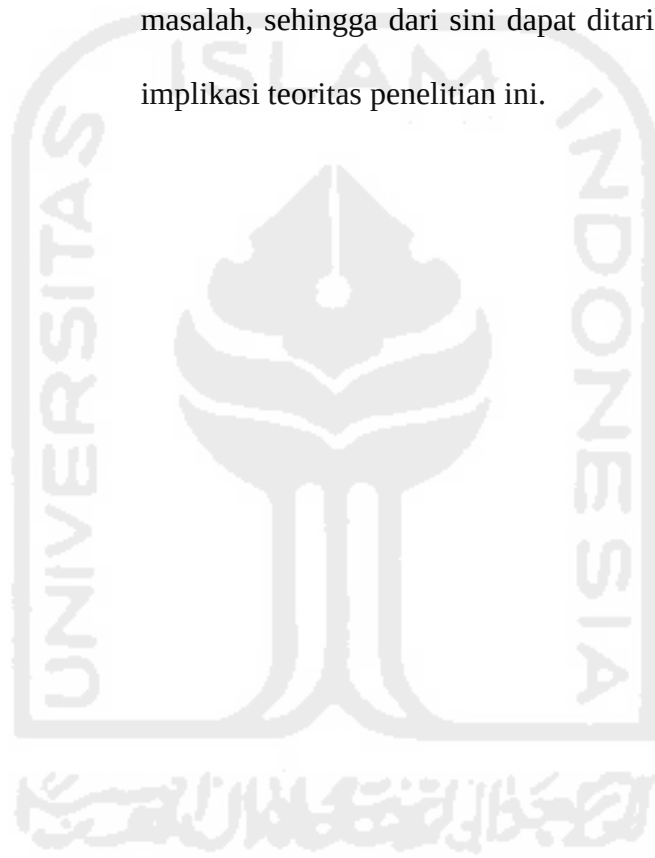
Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Menguraikan tentang deskripsi data penelitian dan penjelasan tentang hasil dan analisis.

BAB V : SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini berisi tentang dua hal yaitu, simpulan yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang langsung diturunkan dari seksi diskusi dan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya, dan implikasi penelitian yang berisi tentang hasil dari kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sehingga dari sini dapat ditarik benang merah apa implikasi teoritis penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Pada bab ini akan memuat dan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Pendidikan dan Kesehatan, Tingkat Keislaman. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah sebagai referensi dan pendukung dalam penelitian, sekaligus memperkuat hasil analisis, adapun penelitian – penelitian tersebut adalah :

Widodo (2006) menyatakan bahwa indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB), baik atas harga berlaku atau dasar harga konstan PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada suatu waktu tertentu sebagai harga dasar.

Nadia (2012) meneliti tentang Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Indonesi tahun 2007 – 2009. Fokus penelitian ini terhadap APBD untuk pendidikan dan Kesehatan, menggunakan data panel dengan kesimpulan bahwa

PDRB berpengaruh positif, Rasio ketergantungan berpengaruh negatif, APBD untuk Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM dan APBD untuk kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM, sedangkan rasio ketergantungan dan konsumsi rumah tangga untuk makanan berpengaruh negatif terhadap IPM. IPM merupakan indikator penting dalam pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus berupaya untuk meningkatkan IPM setiap tahunnya.

Devianti (2012) meneliti tentang Analisis Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Persentase Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah, Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan IPM tahun 20001 – 2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *time series* tahunan dari tahun 2001 – 2010 yang bersifat data kuantitatif. Sumber data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan,

Penelitian ini menemukan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji regresi ternyata memiliki nilai $\text{sig} = 0,002 < 0,05$, karena nilai sig kurang dari 0,05 berarti ada pengaruh positif dan signifikan. Jumlah persentase penduduk miskin, terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Sulawesi Selatan berpengaruh signifikan. Dari hasil uji regresi diketahui bahwa nilai $\text{sig} < 0,05$ berarti ada pengaruh negatif dan signifikan. pemerintah di bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial untuk pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki nilai $\text{sig} = 0,08 < 0,05$, sedangkan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif

terhadap IPM yang memiliki nilai $\text{sig } 0,013 < 0,05$, karena nilai $\text{sig} < 0,05$ berarti signifikan. ketimpangan distribusi pendapatan terhadap IPM yang menunjukkan nilai $\text{sig } 0,001 < 0,05$ berarti ada pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap IPM.

Tri (2014) meneliti tentang pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan jumlah penduduk miskin dalam rangka untuk melihat pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia menggunakan data panel mulai dari periode 2007–2009 dengan meliputi 35 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah. Fokus penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan jumlah penduduk miskin dalam rangka untuk melihat pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Data yang diperoleh berasal dari publikasi BPS, alokasi anggaran pemerintah daerah (Dirjen Perimbangan Keuangan), UNDP, dan Publikasi lainnya. Dari variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan maka berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007 – 2009. Dalam bidang kesehatannya berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah dan yang terakhir jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007 – 2009.

Winarti (2014) meneliti tentang Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992 – 2012. Fokus penelitian ini kepada kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia yang masih rendah menempatin urutan ke 121 dari 187 Negara dan berada diposisi ke 6 dari 10

ASEAN (UNDP, 2013). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil sederhana atau *Ordinary Least Squares* (OLS). Data yang digunakan adalah data time series periode 1992 – 2012.

Rusmiatun (2014) meneliti tentang pengaruh PDRB, pendidikan, kesehatan dan kepadatan penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2007 – 2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan metode data regresi sederhana. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara keseluruhan hasil regresi variabel PDRB, pendidikan, kesehatan dan kepadatan penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin di Indonesia.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 1990 *United Nations Development Program* (UNDP) mengenalkan formula *Human Development Index* (HDI) atau disebut pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia dapat digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah Negara / Daerah merupakan Negara / Daerah yang maju, berkembang, atau terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan gabungan tiga dimensi yaitu dimensi umur, dimensi manusia terdidik, dan dimensi standar hidup yang layak.

Menurut BPS (2009), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran pencapaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata – rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata – rata besarnya pengeluaran perkapital sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup layak.

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara dikatakan maju bukan saja dihitung dari Produk Domestik Bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakat. hal ini sejalan dengan paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*human centered development*). Secara konsep, pembangunan manusia adalah upaya layak dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Pada tataran praktis peningkatan kapasitas dasar adalah upaya meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan (Widodo dkk,2011)

Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom Pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari *Yale University* dan Lord Meghnad Desai dari *London School of Economics*.

Sejak itu dipakai oleh program pembangunan PBB pada laporan HDI tahunannya. Indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna dari pada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan dan indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian pertahun variabel 0 diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel). Menurut *Human Development Report* (HDI, 2013) yang dikutip (Ginanjari, 2014), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan - pilihan bagi manusia (*"A Process Of Enlarging People's Choices"*). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu Negara adalah penduduk karena penduduk kekayaannya suatu Negara. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata - rata suatu Negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*), pendidikan yang diukur berdasarkan rata - rata lama Sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi prioritas daya beli nilai indeks ini berkisar antara 0 - 100. Indeks Pembangunan Manusia lebih fokus pada hal – hal yang lebih sensitif dan berguna dari pada hanya sekedar pendapatan perkapita untuk melihat kemajuan pembangunan yang selama ini digunakan.

Indeks pembangunan manusia dapat mengetahui kondisi pembangunan di daerah dengan alasan :

1. Indeks Pembangunan Manusia menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas manusia.
2. Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya seperti dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.
3. Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja daerah, khususnya dalam hal evaluasi terhadap pembangunan kualitas hidup masyarakat / penduduk.
4. Meskipun dapat menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup manusia, tetapi

Indeks Pembangunan Manusia belum tentu mencerminkan kondisi sesungguhnya namun untuk saat ini merupakan satu – satunya indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan kualitas hidup manusia.

Secara umum metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan di Indonesia sama dengan metode penghitungan yang digunakan oleh UNDP.

Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia disusun berdasarkan tiga komponen indeks yaitu:

- 1) Indeks angka harapan hidup ketika lahir
- 2) Indeks pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama Sekolah (rata - rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani) dan angka melek huruf latin atau lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih)
- 3) Indeks standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita (*PPP-Purchasing Power Parity/paritas daya beli dalam rupiah*).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan rata - rata dari ketiga komponen tersebut dengan rumus:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

Dimana:

X_1 = Angka Harapan Hidup

X_2 = Tingkat Pendidikan

X3 = Tingkat Kehidupan yang Layak

Masing - masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksinya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut:

Dimana:

I_i = Indeks komponen IPM ke i di mana $i = 1, 2, 3$

X_i = Nilai indikator komponen IPM ke i

$MaxX_i$ = Nilai maksimum X_i

$Min X_i$ = Nilai minimum X_i

$$IPM = \sum_{i=1}^3 I_i : I_i = \frac{X_i - MinX_i}{MaxX_i - MinX_i}$$

Tabel 1.1

Nilai Maksimum Dan Minimum Dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
1. Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
2. Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
3. Rata-Rata Lama Sekolah	15	0	Standar UNDP
4. Daya Beli	732.720a)	300.000 (1996) 360.000 b) 1999, 2002	UNDP menggunakan PDB riil d disesuaikan

Sumber: Badan Pusat Statistik, BPS (2009)

Sebagai ilustrasi penghitungan dapat diambil contoh Provinsi X tahun Y yang memiliki data sebagai berikut:

- Angka harapan hidup : 64,93
- Angka melek huruf : 93,10
- Rata-rata lama sekolah : 7,04
- Konsumsi per kapita riil yang disesuaikan: Rp 551.350,-

Berdasarkan data tersebut maka dapat dihitung indeks masing-masing komponen menggunakan persamaan:

$$\text{Indeks angka harapan hidup: } (64,93 - 25)/(85 - 25) = 0,6655$$

$$\text{Indeks angka melek huruf: } (93,10 - 0)/(100 - 0) = 0,9310$$

$$\text{Indeks rata-rata lama sekolah: } (7,04 - 0)/(15 - 0) = 0,4693$$

$$\text{Indeks pendidikan: } 2/3 (0,9310) + 1/3 (0,4693) = 0,7771$$

$$\text{Indeks konsumsi perkapita riil yang disesuaikan: } (551,35 - 300)/(732,72 - 300) = 0,5808$$

Berdasarkan hasil perhitungan indeks angka harapan hidup (0,6655), indeks pendidikan (0,7771), dan indeks konsumsi perkapita riil yang disesuaikan (0,5808), maka dapat dihitung Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu:

$$\text{IPM} = 1/3 (0,6655 + 0,7771 + 0,5808) = 0,6745.$$

Untuk memudahkan dalam membaca angka, Indeks Pembangunan Manusia disajikan dalam ratusan (dikalikan 100) sehingga nilai Indeks Pembangunan Manusia Provinsi X pada tahun Y adalah 67,45.

2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2012) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan oleh masing – masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor – faktor produksi di daerah tersebut. Salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah atau provinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB ini akan menjelaskan sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya yang ada.

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam satu periode (Hadi Sasana, 2006). Pendapatan Domestik Regional Bruto dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing – masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor – faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antara Daerah.

Menurut Rakiman,(2011) Pendapatan Perkapita suatu Negara merupakan tolak ukur kemajuan dari Negara tersebut apabila pendapatan perkapita suatu Negara rendah dapat dipastikan *mekanisme* ekonomi masyarakat di Negara tersebut mengalami penurunan dan begitu pula sebaliknya apabila pendapatan perkapita suatu Negara tinggi maka dapat dipastikan *mekanisme* ekonomi masyarakat tersebut mengalami peningkatan tapi pendapatan tersebut bukan hanya didapat / diperoleh dari mekanisme ekonomi masyarakatnya saja. Banyak faktor yang mempengaruhi penurunan / peningkatan pendapatan tersebut seperti keadaan alam yang tidak dapat diperkirakan keadaannya, kondisi alam ini dapat berubah sewaktu - waktu yang dapat menimbulkan bencana alam yang akan membuat pendapatan suatu Negara akan mengalami penurunan.

Pendapatan perkapita dihitung secara berkala biasanya satu tahun dan mempunyai manfaat yaitu :

1. Sebagai data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu Negara dengan Negara lain.
2. Sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu Negara dengan Negara lain.
3. Sebagai data untuk kebijakan atau sebagai bahan baku pertimbangan mengambil kebijakan atau sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah ekonomi.
4. Sebagai data untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu Negara.

Pendapatan perkapita yang digunakan sebagai *barometer* untuk mengukur taraf hidup rata-rata masyarakat suatu Negara masih ada kekurangan-kekurangan hal ini disebabkan oleh berikut ini :

1. Tingginya pendapatan perkapita suatu Negara dalam perhitungannya kurang memperhatikan aspek pemerataan PDRB perkapita dan harga barang keperluan sehari-hari.
2. Tingginya pendapatan perkapita belum tentu mencerminkan secara realistis tingkat kesejahteraan masyarakat, karena ada faktor-faktor lain yang sifatnya relatif atau sangat subjektif sehingga sulit diukur tingkat kesejahteraannya.
3. Tingginya pendapatan perkapita tidak menjelaskan mengenai masalah pengangguran yang ada serta berapa lama seseorang itu bekerja.

Cara perhitungan PDRB secara konseptual dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Rincian penjelasannya sebagai berikut :

1. Menurut Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing – masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Menurut International Standard Industrial *Classification of All Economic Activities (ISIC)* (BPS), unit – unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu : (1) Pertanian: (2)

Pertambangan dan Penggalian: (3) Industri Pengolahan: (4) Listrik, Gas dan Air Bersih: (5) Bangunan : (6) Perdagangan, Hotel dan Restoran: (7) Pengangkutan dan Komunikasi: (8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan: dan (9) Jasa – jasa.

2. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir.

Komponen – komponen tersebut meliputi :

- a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
- b. Konsumsi pemerintah yaitu pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, ekspor netto.

3. Menurut Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang diikuti serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya.

(BPS, 2000) Cara penyajian Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk yaitu :

- a. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut (BPS, 2012) pengertian PDRB atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi, pengeluaran, pendapatan yang dihitung menurut harga tetap.

Dengan cara mendefinisikn berdasarkan harga – harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto Riilnya.

- b. Produksi Domestik Regional Broto Atas Dasar Harga Berlaku pengertian PDRB atas dasar harga berlaku menurut (BPS, 2012) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu Wilayah. Nilai tambah yang dimaksud merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

Kuncoro (2001) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pemabangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu Provinsi, Kabupaten atau Kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angkat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Saat ini umumnya PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan yaitu dari sisi sektoral/lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku merupakan nilai tamabah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan sementara atas harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Menggambarkan kemampuan suatu Daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya.

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan oleh masing – masing Daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi Daerah tersebut. Adanya ketebatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antara daerah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor ekonomi dari tahun ke tahun dan mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan Luar Negri, perdagangan antara pulau atau antara provinsi. (Aryanti, 2011).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sementara itu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan penggunaan dikelompokkan dalam 6 komponen yaitu:

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa dikurangi dengan penjualan netto barang bekas dan sisa yang dilakukan rumah tangga selama setahun.
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang pemerintah daerah, tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan.
3. Pembentukan Modal Tetap Produk Domestik Bruto mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam daerah dan barang modal bekas atau baru dari luar daerah. Metode yang dipakai adalah pendekatan arus barang.

4. Perubahan Inventori Perubahan stok dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral dikurangi komponen permintaan akhir lainnya.
5. Ekspor Barang dan Jasa Ekspor barang dinilai menurut harga *free on board* (fob).
6. Impor Barang dan Jasa Impor barang dinilai menurut *cost insurance freight* (cif).

Menurut Badan Pusat Statistik (2008) Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan penjumlahan nilai output bersih (barang dan jasa akhir) yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi disuatu wilayah tertentu (Provinsi dan Kabupaten/Kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender), kegiatan ekonomi yang dimaksud mulai kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa-jasa. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui peranan dan potensi ekonomi disuatu wilayah dalam periode tertentu. Berikut ini disajikan data Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut Provinsi di Indonesia pada tahun 2011 - 2015.

Salah satu faktor indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah angka PDRB per kapital. PDRB per kapital digunakan sebagai indikator pembangunan, semakin tinggi PDRB per kapital suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Thamrin, 2001). Hal ini berarti jika semakin tinggi PDRB per kapital semakin sejahtera penduduk suatu wilayah.

Tabel 1.2**Laju Pertumbuhan Ekonomi (dalam Rupiah)**

Data	Satuan	Sumber
PDRB Atas dasar Harga Berlaku	Rupiah	BPS
PDRB Atas Dasar Harga konstan	Rupiah	BPS
Jumlah Penduduk	Jiwa	BPS
PDRB Per Kapital	Rupiah	BPS
Laju Pertumbuhan ekonomi	Persen	BPS

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS, 2010)

Laju pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2007):

$$G = \frac{\text{PDRB1} - \text{PDRB0}}{\text{PDRB0}} \times 100\%$$

G = Laju pertumbuhan ekonomi

PDRB1 = PDRB ADHK pada satu tahun

PDRB0 = PDRB ADHL pada tahun sebelumnya

Produk Domestik Regional Bruto juga dapat digunakan dalam melihat struktur ekonomi dari suatu wilayah. Struktur ekonomi digunakan untuk menunjukkan peran sektor-sektor pekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor

yang dominan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan akan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian. Struktur ekonomi merupakan rasio antara Produk Domestik Regional Bruto suatu sektor ekonomi pada suatu tahun dengan total Produk Domestik Regional Bruto tahun yang sama. Struktur ekonomi dinyatakan dalam persentase. Penghitungan struktur ekonomi adalah sebagai berikut:

$$\text{Struktur Ekonomi} = \frac{\text{PDRB sektor } i}{\text{Total PDRBt}} \times 100\%$$

Dimana ;

PDRB sektor i = Nilai PDRB sektor i pada tahun t

Total PDRBt = nilai total PDRB pada tahun t

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dibagi menjadi dua metode yaitu

a. Metode Langsung

Perhitungan dengan metode langsung dilakukan berdasarkan :

1. Pendekatan Produksi
2. Pendekatan Pendapatan dan
3. Pendekatan Pengeluaran

Dimana dari ketiga pendekatan tersebut akan memberikan hasil yang sama.

b. Metode Tidak Langsung

Perhitungan nilai tambah bruto suatu kegiatan ekonomi / sektor dengan metode tidak langsung adalah dengan mengalokasikan nilai tambah bruto

Provinsi ke masing – masing kegiatan ekonomi di tingkat kabupaten / kota. Sebagai alokatornya digunakan indikator paling relevan atau erat kaitannya dengan produktivitas / pendapatan dari kegiatan sektor tersebut.

c. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indeks berantai dari masing–masing kegiatan ekonomi. Angka indeks yang dihasilkan bisa di dasarkan atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Pada umumnya yang sering digunakan atau dianalisis oleh para ekonomi adalah LPE atas dasar harga konstan, karena menggambarkan pertumbuhan produksi rill dari masing–masing sektor / sumber.

LPE diperoleh dengan cara membagi selisih nilai PDRB sektor/sub sektor tahun berjalan dan tahun sebelumnya dengan PDRB sektor/subsektor tahunan sebelumnya dikalikan 100.

LPE di rumuskan sebagai berikut :

$$LPE(n,i) = \frac{PDRB(n,k,i) - PDRB(n-1,k,i)}{PDRB(n-1,k,i)} \times 100 \%$$

Keterangan:

LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi

K = Atas Dasar Harga Konstan

N = Tahun Berjalan

i = Sektor/ Subsektor

2.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Kesehatan

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (sukirno, 2000) yaitu tindakan Pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Daerah / Regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam perencanaan pembangunan manusia yang dilakukan suatu daerah pastinya memerlukan dukungan tersebut dapat di wujudkan melalui alokasi anggaran disektor-sektor yang menunjukan pembangunan manusia, diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Menurut UUD No.32 Tahun 2003 tentang pengertian Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah adalah sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam peraturan Daerah (perda).

Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak dasar (*azasi*) manusia, sehingga pemerintah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan perlindungan dan fasilitasi kesehatan kepada rakyatnya. Apalagi dalam tujuan pembangunan Nasional telah disebutkan setiap penduduk berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Maka wajar jika kesehatan dapat disebut sebagai investasi pemerintah pada belanja/pengeluaran pembangunan

untuk pengembangan sumber daya manusia. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-undang dasar 1945 pasal 28 H Ayat (1) dan Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Prioritas kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan perspektif penting ekonomi, sisi penting mengenai faktor kesehatan bagi manusia akan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia SDM akan ditentukan oleh status kesehatan, pendidikan, dan tingkat pendapatan perkapita (Ananta dan Hatmadji, 1985) dikutip dari (Yatiman, 2012).

Dibidang kesehatan menurut penelitian dari Bank Dunia tahun 2008, pembangunan dibidang ini meski telah lama diupayakan, ternyata masih mengandung tiga kelemahan :

- a. Banyaknya institusi penyediaan dan pendukung pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Asuransi-asuransi Kesehatan). Hal ini mengakibatkan kualitas pelayanan kesehatan menjadi tidak sebagaimana yang diharapkan.
- b. Baik pemerintah pusat maupun Daerah ternyata megalokasikan anggaran belanjanya ke bidang kesehatan masyarakat masih rendah bila dibandingkan dengan total GDP.

- c. Meski Era Otonomi telah dicanangkan sejak tahun 2001 namun berbagai peraturan pemerintah pusat dan surat keputusan Menteri – menteri banyak yang masih membatasi ruang gerak pemerintah daerah (utamanya Kabupaten/Kota). Akibatnya pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk mengalokasikan anggarannya ke bidang-bidang yang menjadi prioritasnya termasuk bidang kesehatan masyarakat.

Mils dan Gilson (1990) dikutip Yatiman (2012). Memberikan kriteria belanja sektor kesehatan secara umum ke dalam lima aspek yaitu :

- a. Pelayanan kesehatan dan jasa–jasa sanitasi lingkungan
- b. Rumah sakit, institusi kesejahteraan sosial
- c. Pekerjaan medis sosial, kerja sosial
- d. Praktisi media dan penyedia pelayanan kesehatan tradisional
- e. Sektor–sektor tersebut yang kemudian akan mendapat alokasi belanja kesehatan dari pemerintah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembanguna kesehatan maka diperlukan dana baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Broto Wasisto dan Ascobat (1986) menyebutkan bahwa secara garis besar sumber pembiayaan untuk kesehatan dapat digolongkan sebagai sumber pemerintah dan sumber non pemerintah (masyarakat dan swasta).

Selanjutnya sumber pemerintah dapat berasal dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan bantuan Luar negri. Adapun sumber biaya masyarakat atau swasta dapat berasal dari pengeluaran Rumah Tanggaa atau

Perorangan (*out of pocket*), Perusahaan Swasta/BUMN untuk membiayai karyawannya, badan penyelenggara beberapa jenis jaminan pembiayaan kesehatan termasuk asuransi kesehatan untuk membiayai persertanya dan lembaga non pemerintah yang umumnya di gunakan untuk kegiatan kesehatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan.

Sejak tahun 2000 telah diberlakukan kebijakan otonomi Daerah yang didasarkan pada Undang-undang No. 22 tahun 1999. Penerepan kebijakan otonomi daerah oleh pemerintah menuntut perubahan tata kelola urusan pemerintahan dari yang semula bersifat Sentralistik Daerah masing-masing. Menurut Undang-undang no 33 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.4 APBD untuk Pendidikan di Indonesia Tahun 2011–2015

Pendidikan merupakan kerangka dasar bagi Pembangunan Nasional, karena dengan pendidika yang bermutu dapat menciptakan sumber daya manusia yang bermutu pula. Sumber daya manusia ini merupakan aktor utama penggerak pembangunan nasional. Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu pilar penting bagi pembangunan wilayah. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah membawa implikasi yang luas dalam sistem pemerintahan.

Dimana dalam undang-undang tersebut disebutkan secara eksplisit bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib di laksanakan daerah kabupaten dan kota. Dapat diartikan bahwa kemajuan pendidikan nasional dimasa mendatang sangat tergantung dari perhatian

pemerintah Kabupaten/Kota terhadap sektor pendidikan di daerah masing – masing.

Berdasarkan Pernedagri 13 tahun 2006 maka Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. (Kementerian Dalam Negeri, 2006). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (wikipedia.org/wiki/Satuan_Kerja_Perangkat_Daerah).

Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat merupakan alokasi anggaran pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian Negara/lembaga. Kementerian Negara/lembaga yang mendapat alokasi anggaran pendidikan bukan hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama tetapi juga kementerian Negara/lembaga lain yang menyelenggarakan fungsi pendidikan.

Pada tahun anggaran 2012 terdapat 20 kementerian Negara/lembaga yang mendapat alokasi anggaran pendidikan yaitu: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian,

Kementrian Perindustrian, Kementrian ESDM, Kementrian Perhubungan, Kementrian Kesehatan, Kementrian Kehutanan, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pertahanan Nasional, Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Kementrian Pemuda dan Olahraga, Kementrian Pertahanan, Kementrian Tenaga Kerja dan Administrasi, Perpustakaan Nasional, Kementrian Koperasi dan UKM serta Kementrian Komunikasi dan Informatika.

Menurut Mangkoesoebroto (2001), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang menetapkan suatu kebijakan tertentu memiliki konsekunsi biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut di danai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah. Anggaran yang di alokasikan untuk suatu bidang menunjukan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada bidang tersebut. Untuk mengetahui perkembangan anggaran pemerintah pada bidang pendidikan selama periode 2007–2013 dapat di lihat pada Tabel.

Tabel 1.3**Belanja Pemerintah Menurut Fungsi Pendidikan 2007 – 2013****(dalam Rupiah)**

Tahun	Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan
2007	50.843,4
2008	55.298,0
2009	84.919,5
2010	90.818,3
2011	97.854,0
2012	114.962,7
2013	118.467,1

Sumber : Kementerian Keuangan, 2013

Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa pemerintah terus meningkatkan jumlah investasinya pada sektor pendidikan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, pengeluaran yang semakin meningkat tersebut masih kecil bila di bandingkan dengan Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailan. Memperlihatkan bahwa pengeluaran publik untuk bidang pendidikan di Indonesia sebesar 3% dari toaI Produk Domestik Regional Bruto, masih cukup rendah bila dibandingkan dengan Singapore, Malaysia dan Thailand. Malaysia merupakan Negara yang menduduki peringkat pertama dalam hal proporsi pengeluaran untuk pendidikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto yaitu sebesar 5.8% terhadap PDB.

Dalam perencanaan pembangunan manusia yang dilakukan suatu daerah pastinya memerlukan dukungan terutama dari pemerintah. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui alokasi anggaran di sektor-sektor yang menunjang pembangunan manusia diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dalam perjalannya saat ini pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri. Untuk mengatur keuangannya sendiri. Hal tersebut di mulai sejak terjadinya desentralisasi keuangnya sendiri. Hal tersebut dimulai sejak 2001. Otonomi daerah mulai ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU no 32/2004 dan UU No 34/2004.

Pada saat yang bersamaan pula dunia pendidikan nasional juga masih dihadapkan pada beberapa permasalahan mendasar yaitu :

- a. Masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan
- b. Masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan
- c. Masih lemahnya manajemen pendidikan di samping belum terwujudnya kemandirian dan ke unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademis.

Dengan demikian kualitas pendidikan di Indonesia masih memperhatikan. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan secara makro telah diatur dalam pasal 31 UUD 1945 yang mengangkat pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan. Dipertegas lagi oleh Undang-undang sistem Pendidikan Nasional (UUSPN Tahun 2003) pasal 49

ayat (2) yang menyatakan bahwa : "Dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)". Pembiayaan pendidikan dengan asumsi bahwa pembiayaan pendidikan tidak boleh lepas dari kebijaksanaan keuangan Negara juga asumsi yang lain adalah kegiatan-kegiatan pendidikan itu adalah dalam tangkap pencapaian tujuan Pembangunan Nasional.

Dana Anggaran Belanja Pembangunan pada APBD Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sektor-sektor panjang pembangunan manusia seperti sektor Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi juga terus mengalami peningkatan anggaran. Sejalan dengan meningkatnya jumlah anggaran belanja. Jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia Indonesia maka secara umum dapat dikaitkan Provinsi-provinsi yang ada di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun. Perbedaan pemilihan titik tahun dikarenakan anggaran daerah sendiri baru dapat realisasikan pada bulan April setiap tahunnya. Sedangkan data Indeks Pembangunan Manusia sudah tercatat sejak awal tahun sehingga, pengaruh hasil dari alokasi anggaran baru dapat terlihat pada tahun – tahun setelahnya.

2.2.5 Tingkat Keislaman (Ibadah Haji)

Islam (*al-islām*, الإسلام "berserah diri kepada Tuhan") adalah agama yang mengimani satu Tuhan yaitu Allah. Dengan lebih dari satu seperempat miliar orang pengikut diseluruh dunia, menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua didunia setelah agama Kristen. Islam memiliki arti

"penyerahan" atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Pengikut ajaran Islam dikenal dengan sebutan Muslim yang berarti "seorang yang tunduk kepada Tuhan" atau lebih lengkapnya adalah Muslimin bagi laki-laki dan Muslimat bagi perempuan. Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui para nabi dan rasul utusan-Nya dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah.

Islam memberikan banyak amalan keagamaan. Para penganut umumnya digalakkan untuk memegang Lima Rukun Islam, yaitu lima pilar yang menyatukan Muslim sebagai sebuah komunitas. Tambahan dari Lima Rukun, hukum Islam (*syariah*) telah membangun tradisi perintah yang telah menyentuh pada hampir semua aspek kehidupan dan kemasyarakatan.

Isi dari kelima Rukun Islam itu adalah:

1. Mengucapkan dua kalimah syahadat dan meyakini bahwa tidak ada yang berhak ditaati dan disembah dengan benar kecuali Allah saja dan meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul Allah.
2. Mendirikan salat wajib lima kali sehari.
3. Berpuasa pada bulan Ramadan.
4. Membayar zakat.
5. Menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu.

Muslim juga mempercayai Rukun Iman yang terdiri atas 6 perkara yaitu:

1. Iman kepada Allah
2. Iman kepada malaikat Allah
3. Iman kepada Kitab Allāh (Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur dan suhuf)
4. Iman kepada nabi dan rasul Allah
5. Iman kepada hari kiamat
6. Iman kepada qada dan qadar ^[20]

Ibadah Haji merupakan puncak ritual dari rukun Islam. Ibadah Haji juga mengintegrasikan seluruh tataran syariah di dalamnya. Bahkan ibadah haji merupakan investasi syariah dan kekuatan islam yang dahsyat. Hal ini terenfleksi dalam prosesi *wukuf*, *thawaf*, *sa'i* dan *jamarat*. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan amanah UUD 1945. Disamping karena ibadah haji di dilaksanakan di Saudi Arabia. Dasar dan payung hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan pada undang–Nomor 13 tahun 2008 ini belum menjawab tuntutan dan harapan masyarakat, karena substansi dan cakupannya belum sepenuhnya dapat mempresentasikan terselenggaranya ibadah haji secara peripurnal (*professional*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks penting yang perlu dicapai. Karena dengan indeks tersebut dapat dijadikan acuan dalam penilaian tingkat keberhasilan dan kegagalan pembangunan suatu daerah sehingga IPM selalu menjadi arah dan inspirasi para pengambil kebijakan suatu daerah dalam merumuskan dan menjalankan proses pembangunan agar tujuan dan target pembangunan dapat tercapai. Salah satu komponen penting dalam penentuan tingkat IPM adalah tingkat pendidikan selain tingkat harapan hidup dan daya beli

masyarakat.

Nampak jelas bahwa pendidikan merupakan hal yang penting dan mendasar tetapi sesuatu yang mudah kita abaikan padahal secara normatif pendidikan selalu menjadi dasar kebijakan yang dirancang para pengambil kebijakan tetapi selalu jauh dari realisasi. Demikian pula dalam agama Allah menyeru kepada umat manusia untuk menuntut ilmu sebagai bagian dari pendidikan seperti banyak terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an (QS. 16: 43, QS. 58: 11). Namun semua itu ternyata belum cukup bagi para pengambil kebijakan untuk menjadikan pendidikan baik secara umum maupun pendidikan yang memiliki dasar agama sebagai prioritas pembangunan yang sebenarnya hal itu akan menjadi modal penting bagi pembangunan bangsa dengan terciptanya manusia unggul. Tetapi yang lebih penting adalah makna sesungguhnya dari pendidikan dan prinsip-prinsip serta kriteria pendidikan yang diakui sebagai tolak ukur penilaian kepribadian, intelektual, spiritual dan yang dapat digunakan untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang bebas dan bahagia dunia dan akhirat.

Karena manusia diciptakan dari unsur ruh dan jasad, maka kita membutuhkan prinsip pendidikan yang dapat menyerasikan dorongan-dorongan jasad dan ruh tersebut. Prinsip ini hanya dapat terwujud dalam bentuk pendidikan yang didasarkan kepada agama bukan sekedar hasil pemikiran semata. Hal ini dapat terjadi karena motif agama sebenarnya telah terkandung dalam fitrah manusia yang menyebabkan manusia bukan saja dapat memposisikan diri manusia pada tempat yang bermartabat tetapi lebih dari itu manusia dapat

menyesuaikan dorongan batinnya untuk tetap menjadi tunduk kepada perintah-perintah-Nya. Sehingga dengan demikian indikator pendidikan dalam konsep IPM bukan hanya sekedar angka-angka semata dari tingkat lama sekolah dan melek huruf semata, tetapi nilai yang ditunjukkan dari aspek pendidikan tersebut harus benar-benar memiliki kualitas yang bersandarkan kepada agama.

Penilaian aspek pendidikan sebagai indikator IPM bukan saja sebatas tingkat lama sekolah dan melek huruf semata, tetapi nilai yang ditunjukan oleh IPM tersebut perlu memiliki arah penilaian terhadap proses yang mengarahkan hasil pendidikan yang mewujudkan kualitas moral bersandarkan kepada agama. Oleh karena itu kekuatan kendali moral harus muncul dari kedalaman ruh manusia untuk memenuhi dorongan-dorongan bawaan manusia. Jika tidak ajaran-ajaran yang merupakan hasil produk manusia tidak akan mampu menembus realitas tersembunyi yang berada dalam wujud manusia dan tidak memadai dalam mendidik individu dan menuntut manusia ke kehidupan yang bahagia (Sayyid Mujtaba: 197). Karenanya kita harus mengakui keunggulan prinsip keagamaan yang berakar pada kedalaman wujud batin dan hati nurani manusia dan merupakan realitas abadi yang berada di pusat fitrah bawaan manusia atas semua metode yang disarankan di bidang pendidikan, dan mengadopsinya agar supaya manusia bisa mencapai tujuan yang mereka inginkan. Oleh karena itu kita perlu sepakat untuk mengatakan bahwa subjek penghitungan dalam pencapaian IPM terutama dalam aspek pendidikan bukan sekedar angka-angka semata, tetapi perlu juga menilai tingkat kualitas pendidikan manusia yang bersandar pada agama sehingga angka yang ditunjukkan dalam IPM menunjukan juga kualitas moral

keagamaan. Karena sekiranya manusia gagal memperoleh pendidikan dasar yang bersandarkan pada moral keagamaan, maka dalam perkembangan individu manusia selanjutnya dapat menimbulkan gejala dorongan kejiwaan yang akan membesar dan melemahkan kekuatan akal dan hati nurani serta menundukan dorongan-dorongan negatif lainnya dalam jiwa manusia sendiri.

Kondisi ini sangat berbahaya bukan saja bagi dirinya sendiri tetapi juga untuk individu yang lain dan lingkungan serta sumber alam. Karena manusia yang seperti itu akan memiliki kecenderungan berperilaku untuk mengeksploitasi terhadap apa yang ada di sekelilingnya. Manusia yang demikian walau memiliki intelektual yang tinggi tetapi tidak memiliki nurani. Karena disadari bahwa keajaiban yang terhebat dalam penciptaan manusia adalah bahwa dia memiliki watak dasar ganda, yaitu watak positif dan negatif. Oleh karena itu manusia tidak boleh mengabaikan kemampuan tersebut untuk dibimbing ke arah yang benar melalui pendidikan bersandarkan kepada agama.

Sehat adalah kondisi fisik di mana semua fungsi berada dalam keadaan sehat. Menjadi sembuh sesudah sakit adalah anugerah terbaik dari Allah kepada manusia. Adalah tak mungkin untuk bertindak benar dan memberi perhatian yang layak kepada ketaatan kepada Tuhan jika tubuh tidak sehat. Tidak ada sesuatu yang begitu berharga seperti kesehatan. Karenanya, hamba Allah hendaklah bersyukur atas kesehatan yang dimilikinya dan tidak bersikap kufur. Nabi saw. bersabda, *“Ada dua anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan yang baik dan waktu luang.”* (HR. Bukhari)

Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya. Indeks Pembangunan Manusia mengukur pencapaian rata - rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia : (1) Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran , (2) Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah , atas gross enrollment ratio. (3) Standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

Konsep IPM dalam Agama Islam sudah mulai diterapkan mulai masa perjuangan Nabi Muhammad yakni tahun 611-632 Masehi. Salah satu bukti konkritnya tercermin dalam doa selamat yang sering dibaca Ummat Islam sehabis Shalat fardlu.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ سَلَامَةً فِي الدِّينِ، وَعَافِيَةً فِي
الْجَسَدِ، وَزِيَادَةً فِي الْعِلْمِ، وَبَرَكَاتٍ فِي الرِّزْقِ وَتَوْبَةً
قَبْلَ الْمَوْتِ، وَرَحْمَةً عِنْدَ الْمَوْتِ، وَمَغْفِرَةً بَعْدَ
الْمَوْتِ، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا فِي سَكَرَاتِ الْمَوْتِ
وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ، وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ.

Allahumma innaanas ‘aluka salamatan fiddiin wa’aafiyatan filjhasad wa jizadatan fil’ilmi wa barakatan firrizqi wa taubatan kablalmaut wa rahmatan indalmaut wa

magfiratan ba'dalmut. Allahumma hawwin 'alaina fii sakaratilmut wannajaa taminannari wal'afwa 'indalhisaab. Rabbana laa tujighkuluubanaa ba'daizd hadaitanaa wa hablanaa minladunkarahmatan innaka antalwahhab. Rabbanaa aattinaa fiddun-ya hasanah wafil aahirati hasanah waqinaa azaa-bannar. Walhamdulillahi rabil-aalamiin.

Artinya :

“Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau akan keselamatan Agama dan sehat badan, dan tambahnya ilmu pengetahuan, dan keberkahan dalam rizki dan diampuni sebelum mati, dan mendapat rahmat waktu mati dan mendapat pengampunan sesudah mati. Ya Allah, mudahkan bagi kami waktu (sekarat) menghadapi mati, dan selamatkan dari siksa neraka, dan pengampunan waktu hisab.”

Adapun hukum menunaikan ibadah haji adalah wajib bagi setiap orang lelaki dan perempuan sekali seumur hidup dengan syarat-syarat tertentu. Haji adalah sesuatu kemestrian di dalam agama. Barang siapa yang mengingkarinnya boleh jatuh kepada hukum kafir menurut kesepakatan ulama. Haji adalah sebaik-baiknya amal yang dapat membersihkan diri dari kejahatan nafsu dan kecintaan kepada *shwat*, meninggikan mahabbahya dan haji Allah akan menjauhkannya dari perbuatan yang tercela dan menjauhkannya dari pada dosa.

Dasar kefarduan haji dalam Islam di tetapkan oleh Al-quran, Hadis dan ijma'. Adapun dasarnya dalam Al-qur'an sebagaimana firman Allah SWT “ dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi

Baitullah yaitu siapa saja mampu sampai kepadanya dan siapa saja yang kufur (ingkari akan kewajiban ibadah haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari sekalian makhluk. “ (QS. Ali Imran {3} ; 97)

Kendati penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia merupakan kegiatan rutin setiap tahun, namun tidak pernah sepi dari masalah seperti jauhnya pemondokan jamaah dari masjid al-haram, daya tampung dan fasilitas pemondokan yang tidak memadai, transportasi antar jemput jamaah yang kacau. Adanya pungutan yang tidak bertanggung jawab, distribusi *catering* yang kacau, penelantaran calon jamaah oleh KBIH atau penyelenggaraan haji khususnya dan lain sebagainya. Adanya berbagai masalah tersebut sudah barang tentu memberikan dampak tidak baik bagi dan jamaah.

Pemerintah dianggap tidak pernah serius mempersiapkan dan menyelenggarakan proses ibadah haji, hal tersebut tentu lama kelamaan bisa menghilangkan kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintah. Menghilangkan kepercayaan tentang perlunya swastanisasi haji sesungguhnya bermula dari kenyataan tersebut. Banyak kalangan percaya bahwa hanya melalui swtanisasi haji sesungguhnya bermula dari kenyataan tersebut. Banyak kalangan percaya bahwa hanya melalui swatanisasi haji penyelenggaraan haji di Indonesia akan berjalan lebih baik. Namun demikian tidak sedikit pula kalangan yang meragukannya sebab pengalaman pada masa lalu tidak membuktikan hal tersebut. Sistem pengelolaan keuangan haji setiap tahun pemerintah menentukan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang meliputi biaya penerbangan, biaya pemondokan di Mekah dan Madinah serta *living cost* jamaah haji

sebelumnya setiap calon jamaah haji harus menyetor awal dana tabungan haji ke Bank untuk mendapatkan porsi atau seat kemudian melunasi sesuai besaran BPIH ketika jamaah haji tersebut berangkat.

Tabungan haji dari setoran awal calon jamaah haji ini yang kini mencapai 40 triliun rupiah dengan bunga rata-rata 1 triliun rupiah yang dikelola oleh Kementerian Agama dipergunakan untuk mensubsidi kebutuhan jamaah haji yang berangkat lebih dahulu namun praktek ini ini berdasarkan hukumnya karena penggunaan bunga dari tabungan jamaah haji juga tanpa persetujuan calon jamaah haji yang belum berangkat serta besarnya bunga tabungan haji berpotensi rawan penyimpangan dan penyelewengan seperti disinyalir oleh Komisi Pemberantas Korupsi. Selain bunga tabungan haji hal yang paling disorotin adalah tentang pengelolaan Dana Abadi Ummat (DAU) yaitu sejumlah dana yang di peroleh dari hasil pengembangan DAU atau sisa biaya operasional penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber halal yang tidak mengikat.

Ide ini digagas ketika Mentri Agama dijabat oleh Tarmizi Taher dan saat ini diperkirakan DAU tersebut mencapai 2,5 triliun rupiah sesuai dengan pasal 47 ayat 1 UU no 13 Tahun 2008 DAU haruslah dikelola dan dikembangkan untuk kemasalahatan ummat namun prakteknya pemerintah lebih memilih menempatkan DAU ini dalam bentuk sukuk (Surat Berharga Syariah Negara / SBSN) berupa Suku dana haji hal ini di perburuk dengan pencatatan dan pelaporan DAU yang belum transparan dan akuntabel apalagi Badan Pengelola Dana Abadi Ummat secara *ex officio* masih dijabat oleh pejabat kementerian Agama yang harusnya

sesuai dengan amanah Undang-undang di Masyarakat melibatkan unsur masyarakat didalam pengelolaan DAU.

2.5 Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu dan rumusan masalah yang ada maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Diduga Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia
2. Diduga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Kesehatan berpengaruh Positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia
3. Diduga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Pendidikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia
4. Diduga Tingkat Keislaman berpengaruh Positif terhadap Indeks Pemabangunan Manusia di Indonesia

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen sedangkan Untuk variabel Independennya adalah Produk Domestik Regional Bruto, Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Kesehatan, Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Pendidikan dan Tingkat Keislaman jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan menggunakan data panel dari tahun 2011–2015. Sedangkan waktu penelitian yang direncanakan kurang lebih Empat Bulan dari bulan October sampai Februari 2015 .

3.1.2. Definisi Operasional

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau disebut dengan *Human Development Index* (HDI). Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia dapat hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun aspek ekonomi. Dalam penelitian ini satuan data Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks poin. Semakin tinggi angka Indeks Pembangunan Manusia, maka kualitas Pembangunan Manusia untuk dapat hidup akan semakin banyak.

2. Produk domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing – masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor – faktor produksi di daerah tersebut. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing – masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor – faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antara daerah.

3. APBD untuk Kesehatan menurut UUD No.32 Tahun 2003 tentang pengertian APBD adalah sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam peraturan Daerah (perda). Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak dasar (azasi) manusia, sehingga pemerintah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan perlindungan dan fasilitas kesehatan kepada rakyatnya. Apalagi dalam tujuan pembangunan nasional telah disebutkan setiap penduduk berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Maka wajar jika kesehatan dapat disebut sebagai investasi pemerintah pada belanja/pengeluaran pembangunan untuk pengembangan sumber daya manusia.

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan

kesehatan sesuai dengan undang–undang dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) dan Undang–undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Prioritas kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

4. APBD untuk Pendidikan berdasarkan Pemendagri 13 Tahun 2006 maka Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. (Kementerian Dalam Negeri, 2006). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia.

SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Pendidikan merupakan kerangka dasar bagi pembangunan nasional, karena dengan pendidikan yang bermutu dapat menciptakan sumber daya manusia yang bermutu pula. Sumber daya manusia ini merupakan aktor utama penggerak pembangunan nasional. Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu pilar penting bagi pembangunan wilayah. Undang–undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah membawa implikasi yang luas dalam sistem pemerintahan.

5. Tingkat Keislaman yang diukur dari jumlah (Jama'ah Haji) yang diberangkatkan ke tanah Suci Mekah, sebab haji merupakan puncak ritual dari rukun Islam. Ibadah Haji juga mengintegrasikan seluruh tataran syariah didalamnya. Bahkan ibadah haji merupakan investasi syariah dan kekuatan islam yang dahsyat. Hal ini *terenfleksi* dalam prosesi *wukuf, thawaf, sa'i* dan *jamarat*. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan amanah UUD 1945.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dengan periode 2011–2015 yaitu data yang berbentuk angka–angka. Penulis dalam membuat skripsi ini melakukan pengumpulan data dalam membuat skripsi ini melakukan pengumpulan data dalam dua tahap. Tahapan pertama yaitu melalui pengumpulan bebedarapa data penting seperti jurnal, artikel yang telah dipublikasikan. Serta tahapan ke dua yaitu dengan mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan dalam analisa penelitian. Adapun data diperoleh dari Badan Pusat Statistik di Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Internet, Jurnal dan Penelitian terdahulu dan literatur–literatur yang terkait dengan penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel. Pada bagian akhir bab ini akan dijelaskan beberapa uji statistik yang digunakan untuk memilih teknik yang tepat didalam mengestimasi model regresi data panel.

3.3 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan data panel yang artinya adalah gabungan antara data silang *cross section* dengan data runtut waktu *time series*. sebagai hasilnya data set panel akan berisikan informasi bservasi setiap individual data sampel. Data panel dapat berguna bagi penelitian untuk melihat dampak ekonomis yang tidak bisa terpisahkan antar setiap individu dalam beberapa periode. Hal ini tidak bisa didapatkan dari penggunaan data *cross section* atau data *time series* secara terpisah.

Menurut buku Gujarati,2012 Terdapat beberapa keuntungan dari penggunaan metode panel yaitu:

- 1) Mengingat penggunaan data panel juga meliputi data *cross section* dalam rentang waktu tertentu, maka data set akan rentan dari *heterogenitas*. Penggunaan teknik dan estimasi data panel akan memperhitungkan secara *eksplisit heterogenitas* tersebut.
- 2) Dengan pengkombinasian, data akan memberikan informasi yang lebih, tingkat *kolinearitas* yang lebih kecil antar variabel dan lebih efisien.
- 3) Penggunaan data panel mampu meminimal yang dihasilkan jika kita mengagregasikan data individu ke dalam agregasi yang luas.

Ada 3 model yang dapat digunakan untuk menafsirkan data panel yaitu Buku Gujarati dikutip oleh (Baltagi, 2005) :

- 1) *Pooled Least Square* (PLS) atau metode *Common*
- 2) *Fixed Effect Model* (FEM)

3) *Random Effect Model (REM).*

3.3.1. *Pooled Least Square (PLS) Atau Metode Common Effect*

Dalam Buku Gujarati dikutip oleh Ginanjar (2014). Model pertama menggunakan data yang digabung kemudian diestimasi adalah merupakan penggunaan metode *Pooled Least Squares (PLS)* atau metode Common. Koefisiennya menggambarkan dampak variabel independen. Terhadap variable dependen konstan untuk setiap *cross section* dan *time series*. Artinya metode ini tidak memperhitungkan ‘nature’ dari perubahan yang terjadi di setiap *cross section* dan *time series* sehingga kompleksitas kenyataan sebenarnya tidak dapat dicerminkan dalam metode ini. Persamaan model PLS sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_j X_{jit} + U_{it}$$

$i = 1, \dots, N$ dan $t = 1, \dots, K$

kita dapat estimasi model tersebut dengan memisahkan waktunya sehingga ada T seri dengan N penamatan atau dapat dituliskan dengan : $Y_{it} = \alpha_i + \beta_j X_{jit} + \sum_{i=1}^N u_{it}$

keterangan :

Y_{it} = Variabel terikat di waktu t untuk unit cross section i

α_i = Intersep yang berubah – ubah antar unit cross section

X_{jit} = Variabel bebas ke- j di waktu t untuk unit cross section i

β_j = Parameter untuk variabel bebas ke- j

U_{it} = Komponen error di waktu t untuk unit cross section i

Indeks i pada intersep dari masing – masing unit *cross-section* berbeda – beda. Perbedaan ini disebabkan karena penggunaan variabel *dummy* untuk menjelaskan perbedaan intersep yang timbul antara individu. Istilah FEM berasal dari kenyataan bahwa meskipun intersep α_i berbeda antara individu namun intersep sama antara waktu (*time invariant*). (Gujarati, 2004)

3.3.2. Fixed Effect Model (FEM)

Regresi panel dengan *Fixed Effect Model* menggunakan teknik penambahan variabel *dummy* sehingga metode ini seringkali disebut dengan *Least Square Dummy Variabel* model. Persamaan regresi pada *Fixed Effect Model* adalah:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_j X_{it}^j + \sum_{i=2}^n \alpha_i D_i + U_{it}$$

Gujarati (2004) menyatakan bahwa FEM diasumsikan bahwa koefisien *slope* bernilai konstan tetapi *intercept* bersifat tidak konstan. Keputusan memasukan variabel boneka (D_i) pada pendekatan fixed effect tidak dapat dipungkiri akan mengurangi jumlah *degree of freedom* yang pada akhirnya akan mempengaruhi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Buku Gujarati yang dikutip (Ginanjar, 2004)

Metode ini memiliki beberapa kemungkinan asumsi yang bisa digunakan peneliti berdasarkan kepercayaannya dalam memilih data seperti:

- a) Intersep dan koefisien *slope* konstan dari setiap *cross section* di sepanjang waktu. Error diasumsikan mampu mengatasi perubahan

sepanjang waktu dan individu. Asumsi ini mengikuti asumsi dalam metode OLS.

- b) Koefisien slope konstan namun intersepnya bervariasi di setiap cross section.
- c) Seluruh koefisien baik slope maupun intersep bervariasi setiap individu.

Model ini memasukan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai intersep antar unit cross section.

3.3.3. *Random Effect Model*

Ginanjar (2004) menjelaskan bahwa dimasukkannya variabel dummy didalam model *Random Effect* bertujuan untuk mewakili ketidaktauhan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (*error term*) dikenal sebagai metode *random effect*. Persamaan model *random effect* adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it}^j + u_{it} \rightarrow u_{it} = u_i + v_t + w_{it}$$

Dimana :

u_i : Komponen *error cross section*

v_t : Komponen *error time series*

w_{it} : Komponen *error gabungan*.

Melihat persamaan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa MER menganggap efek rata-rata dari data *cross section* dan *time series* direpresentasikan dalam *intercept*. Sedangkan deviasi efek secara *random* untuk data *time series* direpresentasikan dalam v_t dan deviasi untuk data *cross section* dinyatakan dalam u_i .

Pendekatan efek acak dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada pendekatan efek tetap. Hal ini berimplikasi parameter hasil estimasi akan menjadi semakin efisien.

3.4. Pemilihan Model

Sebelum dilakukan pembahasan hasil model regresi panel data, akan dilakukan pemilihan model terbaik yang akan digunakan sebagai dasar melakukan analisis. Dalam pemilihan model dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. LM_test adalah pengujian untuk memilih PLS atau Random effect
2. Uji Hausman digunakan untuk memilih fixed effect atau random effect

3.4.1 Uji LM_Test

LM_Test adalah pengujian untuk memilih model PLS atau model random effect. Dalam pengujian ini dilakukan hipotesa sebagai berikut :

H0: Model PLS (Restricted)

H1: Model Random effect (Unrestricted)

Formulasi untuk menguji hipotesa diatas dengan menggunakan tabel distribusi chi_squares seperti yang dirumuskan oleh Breusch_Pagan :

3.4.2. Uji Hausman Test

Uji hausman digunakan untuk memilih model *fixed effect* atau *random effect*. Gujarati (2012) diikuti oleh Ginanjar (2014) menerangkan hipotesis nol yang mendasari Uji Hausman adalah bahwa estimator - estimator FEM dan REM tidak memiliki perbedaan yang besar. Uji statistik yang dikembangkan oleh Hausman memiliki distribusi χ^2 asimtotis. Jika hipotesis nol ditolak maka kesimpulannya adalah REM tidak tepat karena random-effects kemungkinan berkorelasi dengan satu atau lebih variabel independen dalam hal ini, FEM lebih baik dari pada REM.

Hipotesis :

H0 : korelasi tidak berhubungan dengan regresor lain

H1 : Korelasi berhubungan dengan regresor lain

3.4.3. Uji Signifikansi Common Effect Vs Fixed Effect

Uji F kita gunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan *Fixed Effect* lebih baik dari model regresi *common effect*.

$$F = \frac{SSR_R - SSR_U / q}{SSR_U / (n - k)}$$

SSR_R dan SSR_U *sum of Squared residuals* metode *common effect* dan teknik *fixed effect*. q jumlah restriksi metode *common effect* dan n jumlah observasi dan k jumlah parameter estimasi metode *fixed effect*.

3.5. Pengujian Statistik

Selain uji asumsi klasik, juga dilakukan uji statistik yang dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Uji statistik dilakukan dengan koefisien determinasinya (R^2), pengujian koefisien regresi secara serentak (Uji F), dan pengujian koefisien regresi secara individual (Uji T).

3.5.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar presentase variasi dalam variabel terikat pada model yang diterangkan oleh variabel bebasnya. Nilai R^2 berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Semakin besar R^2 semakin baik kualitas model karena semakin dapat menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen (Gujarati, 2003).

Adapun kegunaan koefisien determinasi adalah :

- 1) Sebagai ukuran ketepatan/kecocokan garis regresi yang dibuat dari hasil estimasi terhadap sekelompok data hasil observasi. Semakin besar nilai R^2 , maka semakin bagus garis regresi yang terbentuk dan semakin kecil R^2 , maka semakin tidak tepat garis regresi tersebut mewakili data hasil observasi.
- 2) Untuk mengukur proporsi/persentase dari jumlah variasi yang diterangkan oleh model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan dari variabel x terhadap variabel y untuk mengukur proporsi/persentase dari jumlah variasi yang diterangkan oleh model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan dari variabel x terhadap variabel y .

3.5.2 Uji F

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel tak bebas. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut :

$$H_0: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 = 0 \text{ (tidak ada pengaruh)}$$

$$H_a: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \neq 0 \text{ (ada pengaruh)}$$

Dengan demikian keputusan yang diambil adalah :

- Terima H_0 jika F statistik < nilai F tabel artinya suatu variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel tak bebas.
- Terima H_a jika nilai F statistik > nilai F tabel artinya nilai suatu variabel bebas merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel tak bebas.

Nilai F - hitung dapat diperoleh dengan rumus :

$$F - \text{Hitung} = \frac{R^2/n}{1 - (R^2)/n - K}$$

Di mana :

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variable independen

n = Jumlah sampel

T= jumlah Time series

Artinya bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen berpengaruh signifikan (Gujarati, 2004).

3.5.3 Uji T

Uji t-statistik merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing - masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Uji t statistik dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual dan menganggap variabel bebas yang lain konstan. Hipotesis nol yang digunakan adalah :

$$H_0: \beta_0 = 0$$

Artinya apakah variabel independen bukan merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Dan hipotesis alternatifnya adalah :

$$H_a: \beta_1 \neq 0$$

Dimana β_i adalah koefisien variabel independen ke I nilai parameter hipotesis dan biasanya b dianggap = 0. Artinya tidak ada pengaruh variabel X_i terhadap Y. Pengujian dilakukan melalui uji-t dengan membandingkan t-statistik dengan t-tabel.

Artinya apakah variabel independen merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Signifikansi pengaruh tersebut dapat diestimasi dengan membandingkan antara nilai t tabel dengan nilai t hitung, jika nilai t hitung > t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai t hitung < t tabel maka H_1 ditolak, yang berarti variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1. Deksripsi Data Penelitian

Penelitian ini untuk mengkaji hubungan antara PDRB, APBD untuk Kesehatan, APBD untuk Pendidikan, Tingkat Keislaman di Indonesia. Variabel yang digunakan yaitu variable independent yang terdiri dari produk domestic (PDRB), APBD untuk Kesehatan, APBD untuk Pendidikan, Tingkat Keislaman di Indonesia. Variabel dependennya adalah Indeks Pembangunan Manusia. Alat bantu yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini berupa alat bantu *Econometric E-views 8 (eviews)*.

4.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya - upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi disegala bidang pembangunan *United Nation Development Programme (UNDP)*. Penting manusia dalam pembangunan adalah manusia dipandang sebagai subyek pembangunan yang artinya pembangunan dilakukan memang bertujuan untuk kepentingan manusia atau masyarakat (<http://google.co.id>)

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan

suatu Negara. Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau Negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama Sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata - rata lama Sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup.

Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor - faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. *United Nation Development Programme (UNDP, 1990).*

Indeks ini pertama kali dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom Pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. UNDP dalam model pembangunannya, menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Berikut data IPM dari tahun 2011 – 2015

Berdasarkan Lampiran 2.1 terjadi fluktuasi setiap provinsi Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2011 – 2015. Provinsi yang tertinggi Indeks

Pembangunan Manusia terdapat di DKI Jakarta pada tahun 2015 sebesar 78,99%. Berarti tingkat indeks pembangunan manusia yang berada di Jakarta meningkat dari Sumber Daya Manusianya juga meningkat. Sedangkan Provinsi yang terendah terdapat di Papua pada tahun 2015 sebesar 55.25%. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia di bagian Timur. Provinsi yang ada di Indonesia terhadap indeks pembangunan manusia dari tahun 2011 – 2015 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Walau ada yang masih kurang dalam indeks pembangunan manusia. Hal ini menunjuknya fluktuasi / kenaikan di setiap tahun pada indeks pembangunan manusia di Indonesia pada tahun 2011 – 2015.

4.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut BPS (2008) Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan penjumlahan nilai output bersih (barang dan jasa akhir) yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi disuatu wilayah tertentu (Provinsi di Indonesia) dan dalam kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui peran dan potensi ekonomi disuatu wilayah dalam periode tertentu. Berikut data yang ada dibawah ini.

Dari lampiran 2.2 dapat dinyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2011-2015 tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta dengan tahun 2015 (1.983.421). Kemungkinan diprediksi tahun 2016 akan naik juga Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia sedangkan yang terkecil Gorontalo

walaupun ada peningkatan setiap tahunnya dalam Produk Domestik Regional Bruto dari tahun 2015 (28.538).

Pengaruh PDRB terhadap IPM menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap IPM. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Khodobakhshi (2011), Hakim, Setiawan (2013) dan Nadia (2013). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan landasan teori yang diemukakan oleh Kuznet bahwa salah satu karakteristik pertumbuhan output per kapital (Todaro 2006). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi mengubah pola konsumsi karena meningkatkan daya beli tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan PM karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yang disebut indikator pendapatan.

4.1.3 Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Kesehatan

Menurut Baswir (1999) yang dikutip oleh Sinulingga (2008) secara umum anggaran pemerintah dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk periode di masa yang akan datang. Struktur anggaran sendiri menggambarkan pengelompokan komponen – komponen anggaran berdasarkan struktur anggaran yang di pakai sekarang , maka anggaran pemerintah dalam anggaran di Indonesia di kenal dua macam pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk operasional pemerintah seperti halnya untuk pembayaran gaji pegawai dan lainnya. APBD untuk kesehatan merupakan salah satu komponen dari belanja daerah.

Dari lampiran 2.3 menyatakan bahwa Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (PDRB) untuk Kesehatan pada tahun 2011–2015, mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Kesehatan yang tertinggi di Indonesia di Provinsi Aceh pada tahun 2015 (2.666.372). Sedangkan yang terendah terdapat di Bali pada tahun, 2015 (1.022). Data diatas menunjukan kenaikan beberapa Provinsi yang ada di Indoneisa ada beberapa provinsi yang mengalami ketidak seimbangan terhadap Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Kesehatan tersebut.

Pengaruh APBD untuk Kesehatan terhadap IPM enemukan bahwa berpengaruh Negatif terhadap IPM. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya. Bentuk tanggung jawab negara terhadap pelayanan kesehatan harus berwujudlam dengan kebijakan anggaran yang memadai. Layanan kesehatan merupakan salah satu hak dasar warga negara yan dijamin oleh konsitusi karena pemerintah wajib membuka akses pelayanan kesehatan seluas mungkin dan memberi layanan berkualitas kepada waraga negara.Tujuan utama pembanunan manusia karena kesehatan berkaitan denan produktivitas.

4.1.4 Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Pendidikan

Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2000) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) untuk daerah/regional. Tujuannya dari menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Berikut data dari Apbd Pendidikan :

Dari Lampiran 2.4 merupakan pada tahun 2015 Provinsi Aceh menunjukan Provinsi dengan Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Pendidikan yang tertinggi dengan jumlah (5.650.12) dan yang paling rendah terdapat diprovinsi Nusan Tenggara Barat dengan Jumlah (63,802).

Penelitian ini menemukan bahwa PBD untuk pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal tersebut terjadi karena struktur alokasi APBD untuk Pendidikan belum sepenuhnya menggambarkan pembangunan kualitas manusia menjadi arah dan kebijakan pembangunan. hal ini secara langsung berkaitan dengan alokasi dana APBD untuk pendidikan tidak merata antar provinsi di Indonesia.

4.1.5 Tingkat Keislaman (Ibadah Haji)

Ibadah haji dilaksanakan di Saudi Arabia. Dasar dan payung hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan pada Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 ini belum menjawab tuntutan dan harapan masyarakat. Karena substansi dan cakupannya belum sepenuhnya dapat mempresentasikan terselenggaranya ibadah haji secara peripurna (*professional*). Nampak jelas bahwa pendidikan merupakan hal yang penting dan mendasar tetapi sesuatu yang mudah kita abaikan padahal secara normatif pendidikan selalu menjadi dasar kebijakan yang dirancang para pengambil kebijakan tetapi selalu jauh dari realisasi.

Demikian pula dalam agama Allah menyeru kepada umat manusia untuk menuntut ilmu sebagai bagian dari pendidikan seperti banyak terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an (QS. 16: 43, QS. 58: 11).

Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya. Indeks Pembangunan Manusia mengukur pencapaian rata - rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia : (1) Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran , (2) Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah , atas *gross enrollment ratio*. (3) Standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

Dari tabel di atas menyatakan menyatakan Tingkat Keislaman (Ibadah Haji) menurut Provinsi tahun 2011– 2015 terjadinya ke tidak stabilan. Contohnya di DKI Jakarta yang pada tahun 2011 dengan jumlah 2015 (5.581). peningkatan terdapat di tahun 2011 namun bergantinya tahun sampai 2015 penurunan yang sampai (5.581) yang berangkat haji. Sedangkan di DIY Yogyakarta sendiri juga mengalami penurunan bahkan provinsi yang di kenal dengan keagamaan yang kuat yaitu Aceh juga mengalami penurun dari tahun ke tahun.

4.2 Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan membahas secara khusus regresi yang menggabungkan data *time series* dengan data *cross section* yang dikenal dengan regresi data panel.

Pebebasan akan dimulai dengan teknik yang digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel. Pada bagian akhir bab ini akan dijelaskan beberapa uji statistik yang digunakan untuk memilih teknik yang tepat didalam mengestimasi model regresi data panel.

4.3 Common Effect, Fixed Effect, Random Effect dan Model Estimasi Fixed Effect dan Random Effect.

4.3.1 Model Common Effect

Teknik yang digunakan dalam metode *Common Effect* hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Dengan hanya menggabungkan kedua jenis data tersebut maka dapat digunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, dan dapat diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai rentang waktu. Asumsi ini jelas sangat jauh dari realita sebenarnya, karena karakteristik antar perusahaan baik dari segi kewilayahan jelas sangat berbeda

Tabel 3.1 Hasil *Common Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	66.22475	0.382470	173.1504	0.0000
X1?	8.78E-06	1.46E-06	6.034029	0.0000
X2?	-7.88E-14	2.01E-13	-0.391930	0.6957
X3?	4.08E-14	1.12E-13	0.363252	0.7169
X4?	-0.000272	6.52E-05	-4.163480	0.0001
R-squared	0.214264	Mean dependent var		67.22809
Adjusted R-squared	0.193587	S.D. dependent var		4.226561
S.E. of regression	3.795473	Akaike info criterion		5.536824
Sum squared resid	2189.653	Schwarz criterion		5.634157
Log likelihood	-429.6407	Hannan-Quinn criter.		5.576354
F-statistic	10.36232	Durbin-Watson stat		0.037862
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan Eviews

Hasil regresi menunjukkan bahwa tanda variabel Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (X1) sebesar koefisiennya 8.73E-06 dengan standar error 1.46E-06, Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Kesehatan (X2) -7.88E-14 dengan std error 2.01E-13 dengan Prob 0.6957 tidak

signifikan karena probabilitasnya lebih besar dari 05, Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Pendidikan (X3) koefisiennya sebesar $4.08E-14$ dan std error $1.12E-13$ prob sebesar 0.7169 dan Tingkat Keislaman (X4) koefisiennya -0.000272 std error $6.52E-05$ dan prob 0.0001 berhubungan positif terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (Y) sesuai dengan yang diharapkan teori. Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat keislaman mengalami signifikan dengan hasil 0.0000 untuk Produk Domestik Regional Bruto sedangkan 0.0001 untuk tingkat keislaman.

4.3.2 Model *Fixxed Effect*

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Fixed Effect*. Pengertian model *fixed effect* adalah model dengan *intercept* berbeda-beda untuk setiap subjek (cross section), tetapi *slope* setiap subjek tidak berubah seiring waktu (Gujarati, 2012). Model ini mengasumsikan bahwa *intercept* adalah berbeda setiap subjek sedangkan *slope* tetap sama antar subjek. Dalam membedakan satu subjek dengan subjek lainnya digunakan variabel *dummy* (Kuncoro, 2012). Model ini sering disebut dengan model *Least Square Dummy Variables* (LSDV).

Tabel 3.2 Hasil *Fixxed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	66.98900	0.837963	79.94263	0.0000
X1?	4.66E-06	1.48E-06	3.149494	0.0021
X2?	-2.23E-14	5.28E-14	-0.422673	0.6733
X3?	8.76E-15	2.94E-14	0.297551	0.7666
X4?	-0.000199	8.84E-05	-2.256627	0.0258
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.973433	Mean dependent var		67.22809
Adjusted R-squared	0.965749	S.D. dependent var		4.226561
S.E. of regression	0.782215	Akaike info criterion		2.544769
Sum squared resid	74.03506	Schwarz criterion		3.245564
Log likelihood	-163.7643	Hannan-Quinn criter.		2.829386
F-statistic	126.6733	Durbin-Watson stat		0.698638
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan Eviews

Hasil regresi menunjukan yang signifikan hanya dua yaitu Produk Domestik Regional Bruto (X1) dan Tingkat Keislaman (X4). Mengalami signifikan yaitu sebesar X1 (0.0021) dan X2 (0.0258). Sedangkan R-squarednya sebesar 0.973433 hampir mendekati 1% yang baik dari pada jauh di bawah 1% atau di atas 1%.

Berdasarkan Gujarati (2012) persamaan model ini adalah sebagai berikut :

Dimana variabel *dummy* d_{1t} untuk subjek pertama dan 0 jika bukan, d_{2t} untuk subjek kedua dan 0 jika bukan, dan seterusnya. Jika dalam sebuah penelitian menggunakan 10 *crossection*, maka jumlah variabel *dummy* yang digunakan sebanyak 9 variabel untuk menghindari perangkat variabel *dummy*, yaitu kondisi dimana terjadi kolinearitas sempurna (Gujarati, 2012). *Intercept* b_0 adalah nilai *intercept* subjek kesatu dan koefisien b_6 , b_7 , b_8 menandakan besar perbedaan antara *intercept* subjek lain terhadap subjek kesatu Metode dengan menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Metode ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar perusahaan dan antar waktu, namun intersepnya berbeda antar perusahaan namun sama antar waktu (*time invariant*). Namun metode ini membawa kelemahan yaitu berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter.

4.3.3 Model *Random Effect*

Random effect disebabkan variasi dalam nilai dan arah hubungan antar subjek diasumsikan *random* yang dispesifikasikan dalam bentuk residual (Kuncoro, 2012). Model ini mengestimasi data panel yang variabel residual diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Menurut Widarjono (2009) model *random effect* digunakan untuk mengatasi kelemahan model *fixed effect* yang menggunakan variabel *dummy*. Metode analisis data panel dengan model *random effect* harus memenuhi persyaratan yaitu jumlah *cross section*

harus lebih besar daripada jumlah variabel penelitian. Persamaan model *random effect* menurut Gujarati (2012).

Tabel 3.3 Hasil *Random Effect*

C	66.54100	0.826323	80.52663	0.0000
X1?	5.62E-06	8.97E-07	6.266437	0.0000
X2?	-2.45E-14	5.26E-14	-0.465932	0.6419
X3?	1.07E-14	2.93E-14	0.364150	0.7163
X4?	-0.000155	5.05E-05	-3.070121	0.0025
Random Effects (Cross)				
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			3.930230	0.9619
Idiosyncratic random			0.782215	0.0381
Weighted Statistics				
R-squared	0.326559	Mean dependent var		6.016475
Adjusted R-squared	0.308836	S.D. dependent var		1.013580
S.E. of regression	0.777152	Sum squared resid		91.80264
F-statistic	18.42659	Durbin-Watson stat		0.581452
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.187000	Mean dependent var		67.22809
Sum squared resid	2265.632	Durbin-Watson stat		0.023560

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan Eviews

Hasil Regresi di Random Effect yang signifikan hanya dua variabel terdapat di PDRB (X1) dan Jumlah Tingkat Agama (X2). Dari hasil random effect terdapat Cross-section random sebesar t statistik 3.930230 dan prob 0.9619, signifikan terdapat ipm, pdrb dan tingkat keislaman.

d. Uji Chow

Chow test adalah pengujian untuk menentukan model Fixed Effect atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

Tabel 3.5 Hasil Uji Chow

Cross-section F	111.538191	(31,121)	0.0000
Cross-section Chi-square	531.752696	31	0.0000
C	66.22475	0.382470	173.1504
X1?	8.78E-06	1.46E-06	6.034029
X2?	-7.88E-14	2.01E-13	-0.391930
X3?	4.08E-14	1.12E-13	0.363252
X4?	-0.000272	6.52E-05	-4.163480
R-squared	0.214264	Mean dependent var	67.22809
Adjusted R-squared	0.193587	S.D. dependent var	4.226561
Sum squared resid	2189.653	Schwarz criterion	5.634157
Log likelihood	-429.6407	Hannan-Quinn criter.	5.576354
F-statistic	10.36232	Durbin-Watson stat	0.037862
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan Eviews

Hasil regresinya membuktikan bahwasanya Cross-section Chi-square statistic berjumlah 531.752696 dengan probabilitasnya sebesar 0.0000 dan Cross section F statistik 111.538191 dan probabilitasnya sebesar 0.0000, signifikan terdapat di X1 dan X4 sebesar (0.0000) dan (0.0001). R-squared mengalami penurunan yaitu sebesar 0.214264 dengan prob(F-statistic) sebesar 0.0000.

Tabel 3.6 Hasil Hausment Test

Cross-section random		2.203435	4	0.6984
X1?	0.000005	0.000006	0.000000	0.4161
X2?	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.6207
X3?	0.000000	0.000000	0.000000	0.4650
X4?	-0.000199	-0.000155	0.000000	0.5408
C	66.98900	0.837963	79.94263	0.0000
X1?	4.66E-06	1.48E-06	3.149494	0.0021
X2?	-2.23E-14	5.28E-14	-0.422673	0.6733
X3?	8.76E-15	2.94E-14	0.297551	0.7666
X4?	-0.000199	8.84E-05	-2.256627	0.0258
R-squared	0.973433	Mean dependent var	67.22809	
Adjusted R-squared	0.965749	S.D. dependent var	4.226561	
S.E. of regression	0.782215	Akaike info criterion	2.544769	

F-statistic	126.6733	Durbin-Watson stat	0.698638
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan Eviews

Hasil regresi dirandome effect terdapat cross-section randome sebesar 2.203435 dengan prob 0.6984. terdapat dua yang disignifikan yaitu variabel X1 dan X4 dimana Probabilitasnya (0.0021) dan (0.0258). R-squarednya berjumlah 0.973433 dimana mendekatain 1% yang artinya bagus dengan prob(F-statistic) 0.000000.

Dari hasil regresi data panel diketahui bahwa PDRB di 33 provinsi di Indonesia berpenaruh positif terhadap IPM di Indonesia dengan koefisien sebesar 0.0021 berarti bahwa setiap peningkatan PDRB sebesar 1 persen maka dapat menyebabkan kenaikan IPM sebesar 0.0021 persen dengan asumsi tetap.

4.4 Pemilihan Model

Pemilihan model yang digunakan dalam sebuah penelitian perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan statistic. Hal ini ditunjukkan untuk memperoleh dugaan yang efisien. Karena data yang dianalisis merupakan data panel, maka harus ditentukan metode pendekatan analisis. Pendekatan analisis panel data yang diuji adalah pendekatan *pooled least square*, pendekatan efek tetap (*fixed effect*) dan pendekatan efek acak (*random effect*) melalui uji Chow untuk memilih antara pendekatan *pooled least square* atau pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan uji Hausman untuk memilih antara pendekatan efek tetap (*fixed effect*) atau efek acak

(*random effect*) sehingga mendapatkan pendekatan yang paling tepat terhadap model.

4.3.3. Uji F- statistik (chow test)

Uji ini digunakan untuk memilih model yang akan digunakan yaitu *Common Effect* atau *Fixed Effect*. Pemilihannya dengan cara melihat nilai probabilitas F statistiknya:

1. H_0 : memilih model *Common Effect*, jika nilai probabilitas F statistic tidak signifikan pada α 5%
2. H_1 : memilih model *Fixed Effect*, jika nilai probabilitas F statistic signifikan pada α 5%

Tabel 3.7 Hasil Pengujian Signifikan Fixed Effect

Cross-section F	111.538191	(31,121)	0.0000
Cross-section Chi-square	531.752696	31	0.0000
C	66.22475	0.382470	173.1504
X1?	8.78E-06	1.46E-06	6.034029
X2?	-7.88E-14	2.01E-13	-0.391930
X3?	4.08E-14	1.12E-13	0.363252
X4?	-0.000272	6.52E-05	-4.163480
R-squared	0.214264	Mean dependent var	67.22809
Adjusted R-squared	0.193587	S.D. dependent var	4.226561

S.E. of regression	3.795473	Akaike info criterion	5.536824
Sum squared resid	2189.653	Schwarz criterion	5.634157
Log likelihood	-429.6407	Hannan-Quinn criter.	5.576354
F-statistic	10.36232	Durbin-Watson stat	0.037862
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan Eviews

Berdasarkan hasil pengujian di atas di peroleh angka Probabilitas Cross - section F sebesar 0,0000 dengan demikian maka di ketahui bahwa nilai p-value lebih kecil dari α (0,05), sehingga kesimpulan dari hasil uji chow adalah menolak H_0 , sehingga model *Fixed Effect Model* lebih baik untuk digunakan daripada *Pooled Least Square (common effect)*. Nilai distribusi *Chi Square* dari perhitungan menggunakan *Eviews8* adalah 531.752696 dengan probabilitas 0.0000 (kurang dari 5%) , sehingga secara statistik H_0 ditolak dan menerima H_1 , maka model yang tepat digunakan adalah *fixed effect*.

4.4.2 Uji Hausman

Pengujian ini membandingkan model *fixed effect* dengan *random effect* dalam menentukan model yang terbaik untuk digunakan sebagai model regresi data panel (Gujarati, 2012). Hausman *test* menggunakan program yang serupa dengan Chow *test* yaitu program *Eviews*. Hipotesis yang dibentuk dalam Hausman *test* adalah sebagai berikut :

H_0 : Model *Random Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

H_0 ditolak jika P -value lebih kecil dari nilai α . Sebaliknya, H_0 diterima jika P -value lebih besar dari nilai α . Nilai α yang digunakan sebesar 5%.

Hasil pengujian *Hausman Test* adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Hasil Pengujian *Hausman Test*

Cross-section random				
	2.203435	4	0.6984	
X1?	0.000005	0.000006	0.000000	0.4161
X2?	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.6207
X3?	0.000000	0.000000	0.000000	0.4650
X4?	-0.000199	-0.000155	0.000000	0.5408
C	66.98900	0.837963	79.94263	0.0000
X1?	4.66E-06	1.48E-06	3.149494	0.0021
X2?	-2.23E-14	5.28E-14	-0.422673	0.6733
X3?	8.76E-15	2.94E-14	0.297551	0.7666
X4?	-0.000199	8.84E-05	-2.256627	0.0258
R-squared	0.973433	Mean dependent var	67.22809	
Adjusted R-squared	0.965749	S.D. dependent var	4.226561	
S.E. of regression	0.782215	Akaike info criterion	2.544769	
Sum squared resid	74.03506	Schwarz criterion	3.245564	
Log likelihood	-163.7643	Hannan-Quinn criter.	2.829386	

F-statistic	126.6733	Durbin-Watson stat	0.698638
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan Evies

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai *chi-square statistic* sebesar 2.203435 dengan Probabilitasnya 0.6984, maka model yang tepat digunakan adalah *Random Effect*. Dengan hasil regresi data panel diketahui bahwa PDB di 33 Provinsi di Indonesia berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap IPM di Indonesia dengan Koefisien sebesar 0.000006 berarti bahwa setiap peningkatan PDB sebesar 1 persen, maka dapat menyebabkan kenaikan sebesar 0.000006 persen dengan asumsi variabel lain tetap.

APBD untuk kesehatan di 33 provinsi di Indonesia berpengaruh Negatif dan tidak signifikan terhadap IPM di Indonesia dengan $\alpha = 0,1$ H_0 tidak dapat ditolak tapi $\alpha = 0,1$ H_0 ditolak. APBD untuk kesehatan di 33 provinsi di Indonesia berpengaruh negatif terhadap IPM.

4.4.3 Model Estimasi Random Effect

Hasil pengujian regresi data panel dengan menggunakan metode *Random Effect Model* adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 Model Estimasi *Random Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	66.98900	0.837963	79.94263	0.0000
X1?	4.66E-06	1.48E-06	3.149494	0.0021
X2?	-2.23E-14	5.28E-14	-0.422673	0.6733
X3?	8.76E-15	2.94E-14	0.297551	0.7666
X4?	-0.000199	8.84E-05	-2.256627	0.0258
Fixed Effects (Cross)				
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.973433	Mean dependent var		67.22809
Adjusted R-squared	0.965749	S.D. dependent var		4.226561
S.E. of regression	0.782215	Akaike info criterion		2.544769
Sum squared resid	74.03506	Schwarz criterion		3.245564
Log likelihood	-163.7643	Hannan-Quinn criter.		2.829386
F-statistic	126.6733	Durbin-Watson stat		0.698638
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Pengelolahan Data dengan Eviews (8)

$$Y = 66.98900 + 4.66E-06*X1 - 2.23E-14*X2 + 8.76E-15*X3 - 0.000199*X4$$

Keterangan :

Y = Indeks Pembangunan manusia

X1 = Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku

X2 = APBD untuk Kesehatan

X3 = APBD untuk Pendidikan

X4 = Tingkat Keislaman

4.4 Uji Hipotesis

4.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variable independent (PDRB), APBD untuk pendidikan, APBD untuk kesehatan, Tingkat Keislaman (Ibadah haji), bahwa nilai r-square sebesar 0.973433 atau sebesar 97% artinya variabel dependent dapat di jelaskan oleh variabel independent sebesar 97% dan sisanya sebesar 3% dijelaskan oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel-variabel independent (PDRB), APBD untuk pendidikan, APBD untuk kesehatan, Tingkat Keislaman (Ibadah Haji) terhadap variabel dependent (Indeks Pembangunan Manusia).

4.4.2. Uji F- statistik

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara bersamaan variable independent mempengaruhi variable dependent atau tidak. dari tabel *Random*

Effect di atas terlihat bahwa nilai F dihitung sebesar 126.6733 dan probabilitasnya sebesar 0.000000 signifikan karena pada $\alpha=5\%$ sehingga secara statistik PDRB, APBD untuk Kesehatan, APBD untuk Pendidikan, Tingkat Keislaman mempengaruhi persentase Indeks Pembangunan Manusia.

4.4.3 Uji t Statistik

Pengujian ini digunakan untuk menguji koefisien regresi termasuk juga intersep secara individu. Pengujian hipotesis melalui uji statistik t dilakukan untuk menguji signifikan pengaruh individual masing - masing variabel bebas dalam model terhadap variabel dependennya. Selain menguji signifikansi dengan *probability (t-statistic)* dengan α sebesar 5 persen, juga dilakukan uji arah atas nilai koefisiennya.

4.5 Interpretasi Hasil Analisis

4.5.1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dapat dilihat dari tabel 4.7 *Random Effect* diatas bahwa koefisien Produk Domestik Regional Bruto (X1) sebesar 4.66E-06 dan probabilitas sebesar 0.0021. Probabilitas variabel ini adalah uji dua sisi, sedangkan uji penelitian ini satu sisi maka probabilitas harus dibagi dua menjadi 0.00105 mengalami signifikan α 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian (Gujarati). Sehingga statistik kesehatan mempengaruhi indeks manusia, sehingga secara statistik Produk Domestik Regional Bruto mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Mengalami signifikan PDRB dalam mempengaruhi

Indeks Pembangunan Manusia dapat di lihat berdasarkan data dari data PDRB di Indonesia dari tahun 2011 – 2015 tidak ada penurunan di Indonesia.

4.5.2 Anggran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dapat dilihat dari table *Random Effect* diatas bahwa koefisin APBD untuk Kesehatan (X2) sebesar $-2.23E-14$ dan Probabilitas sebesar 0.6733 probabilitas variabel ini belum diuji dua sisi sedangkan uji penelitian ini satu sisi maka probabilitas harus dibagi dua menjadi yaitu 0.33665 tidak signifikan sehingga statistik Apbd untuk Kesehatan tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan. karena uji dua sisi dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. (uji dilakukan 2 sisi karena untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan, jika 1 sisi digunakan untuk mengetahui hubungan lebih kecil atau lebih besar).

4.5.3 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dapat dilihat dari table *Random Effect* diatas bahwa koefisien tingkat APBD untuk Pendidikan (X3) sebesar $8.76E-15$ dan Probabilitas sebesar 0.7666, probabilitas variabel ini adalah uji dua sisi sedangkan uji penelitian ini satu sisi maka probabilitas harus di bagi dua menjadi 0.3833 tidak signifikan sehingga secara statistik kesehatannya tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

Dari hasil regresi dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel APBD untuk Pendidikan menunjukkan tanda negatif dan tidak berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Hasi

tersebut sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini.

4.5.4 Tingkat Keislaman (Ibadah Haji)

Dapat dilihat dari table *Random Effect* diatas bahwa koefisien Tingkat Keislaman sebesar -0.000199 dan probabilitasnya sebesar 0.0258, probabilitas variabel ini adalah uji dua sisi, sedangkan uji penelitian ini satu sisi maka probabilitas harus di bagi dua menjadi 0.0129 signifikan pada sehingga secara statistik Tingkat Keislaman mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

4.4. Pembahasan

Berdasarkan analisis perhitungan yang dilakukan diatas dengan menggunakan Uji Hausman dapat di simpulkan bahwa model estimasi yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah model estimasi *random effect*.

Dilihat dari hasil estimasi model *Random Effect* Rata-rata tingkat Indeks Pembangunan Manusia (C) pada 34 Provinsi di Indonesia tahun 2011–2015 sebesar 66.98900 persen. Dilihat dari Provinsi yang memiliki tingkat Indeks Pembangunan Manusia tertinggi adalah Provinsi Yogyakarta dengan nilai sebesar 9.745470 persen dan yang paling rendah Indeks Pembangunan Manusia terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar -11.21396. Angka yang cukup tinggi dalam rendahnya Indeks Pembangunan manusia di Indonesia, salah satu penyebab tingkat Indeks Pembangunan yang ada di Indonesia adalah karena faktor rendahnya APBD untuk pendidikan dimasyarakat, Pendidikan memegang penting dalam pembentukan Sumber Daya Manusia pembangunan yang berkualitas di Indonesia.

Berdasarkan model estimasi *random effect*, diketahui Produk Domestik Bruto (X1) menunjukkan tanda signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia sebesar 4.66E-06 dengan probabilitas sebesar 0.0021. Hasil tersebut tidak sesuai dengan teori dalam penelitian ini. Signifikannya Produk Domestik Regional Bruto dalam mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia juga dapat dilihat berdasarkan data bahwa peningkatan laju PDRB di Indonesia dari tahun 2011 sampai 2015 meningkatnya di Indonesia. Seperti halnya pertumbuhan di Produk Domestik Regional Bruto ditahun 2011 sampai 2015 malah terjadi kenaikan di Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan landasan teori yang dikemukakan oleh Kuznet bahwa salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi moderen adalah tingginya pertumbuhan output perkapital (Todaro, 2006). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi mengubah pola konsumsi karena peningkatan daya beli. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yang disebut indikator Pendapatan.

Menurut Badan Pusat Statistik (2012) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk. Ada pun tiga indikator tersebut yaitu: indikator kesehatan, tingkat pendidikan, dan ekonomi. Kualitas fisik tercermin dari angka

harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik tercermin dari lamanya rata-rata penduduk bersekolah, angka melek huruf dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi yaitu pengeluaran riil perkapita. Indonesia memiliki tiga puluh empat (34) Provinsi tentunya akan memberikan gambaran mengenai pembangunan manusia yang bervariasi. Mengalami signifikan Produk Domestik Regional Bruto dalam mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat berdasarkan data dari data PDRB di Indonesia dari tahun 2011–2015 tidak ada penurunan di Indonesia.

Hasil pengujian dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa variable Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk kesehatan tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Koefisien Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk kesehatan (X2) diperoleh sebesar $-2.23E-14$ yang berarti bahwa peningkatan pengeluaran daerah tidak akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Kesehatan pada tahun 2011–2015, mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Kesehatan (X2) yang tertinggi di Indonesia di Provinsi Aceh pada tahun 2015 (2.666.372). Sedangkan yang terendah terdapat di Bali pada tahun, 2015 (1.022). Data diatas menunjukkan kenaikan beberapa Provinsi yang ada di Indoneisa ada beberapa provinsi yang mengalami ketidakseimbangan terhadap Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Kesehatan tersebut.

Hasil tersebut tidak sesuai dengan landasan dan penelitian terdahulu dari indeks pembangunan manusia. Pemerintah wajib membuka akses pelayanan

kesehatan seluas mungkin dan memberi layanan berkualitas kepada setiap warga negara. Dalam konteks layanan kesehatan bagi warga miskin, pemerintah telah meluncurkan berbagai program. Tujuannya utama Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk kesehatan adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Dengan adanya alokasi khusus untuk kesehatan yang berasal dari Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah diharapkan akan meningkatkan kesehateraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan manusia karena kesehatan berkaitan dengan produktivitas.

Secara keseluruhan besarnya belanja di sebageian besar Provinsi di seluruh Indonesia dari 2011 sampai 2015 mengalami peningkatan. Hanya dua Provinsi yang selalu turun selama kurun waktu tersebut, yaitu Provisi Kalimantan dan Provinsi Papua Barat. Meskipun Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu tiga tahun selalu mengalami penurunan, kemungkinan disebabkan karena sebagai Provinsi hasil pemekaran orientasi pembangunan Daerahnya lebih diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakatnya. Selain itu juga karena tingkat kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat yang lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi DIY.

Sejak tahun 2000 telah diberlakukan kebijakan otonomi Daerah yang didasarkan pada Undang –undang No. 22 tahun 1999. Penerepan kebijakan otonomi daerah oleh pemerintah menuntut perubahan tata kelola urusan pemerintahan dari yang semula bersifat Sentralitistik Daerah masing – masing.

Menurut Undang – undang no 33 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hasil Pengujian dalam penelitian menunjukan bahwa APBD untuk Pendidikan (X3) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Hal ini diduga karena porsi pendidikan, fasilitas dan lainnya. Berdasarkan koefisien APBD untuk pendidikan sebesar $8.76E-15$. Dari tabel diatas merupakan pada tahun 2015 Provinsi Aceh menunjukan Provinsi dengan APBD untuk Pendidikan yang tertinggi dengan jumlah (5.650.12) dan yang paling rendah terdapat di provinsi Nusan Tenggara Barat dengan Jumlah (63,802). Hal tersebut terjadi karena struktur alokasi APBD untuk pendidikan belum sepenuhnya menggambarkan pembangunan kualitas manusia dan kebijakan pembangunan. keterjangkauan masyarakat untuk menikmati pendidikan kurang karena masih banyak sekolah – sekolah yang kurang bagus dari fasilitas maupun jasanya di bidang pendidikan di Indonesia.

Pendidikan merupakan kerangka dasar bagi pembangunan nasional, karena dengan pendidika yang bermutu dapat menciptakan sumber daya manusia yang bermutu pula. Sumber daya manusia ini merupakan aktor utama penggerak pembangunan nasional. Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu pilar penting bagi pembangunan wilayah. Undang – undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah membawa implikasi yang luas dalam sistem pemerintahan.

Dimana dalam Undang – undang tersebut disebutkan secara eksplisit bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib

dilaksanakan daerah kabupaten dan kota. Dapat diartikan bahwa kemajuan pendidikan nasional dimasa mendatang sangat tergantung dari perhatian pemerintah Kabupaten / Kota terhadap sektor pendidikan di daerah masing – masing.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat keislaman berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan amanah UUD 1945. Dari tabel di atas menyatakan menyatakan Jumlah jama'ah Haji yang Diberangkatkan ke tanah Suci Mekah menurut Provinsi tahun 2011– 2015 terjadinya ke tidak stabilan. Contohnya di DKI Jakarta yang pada tahun 2011 dengan jumlah 2015 (5.581).

peningkatan terdapat di tahun 2011 namun bergantinya tahun sampai 2015 penurunan yang sampai (5.581) yang berangkat haji. Sedangkan di DIY Yogyakarta sendiri juga mengalami penurunan bahkan provinsi yang di kenal dengan keagamaan yang kuat yaitu Aceh juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di samping karena ibadah haji di laksanakan di Saudi Arabia. Dasar dan payung hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan pada undang – Nomor 13 tahun 2008 ini belum menjawab tuntutan dan harapan masyarakat. karena substansi dan cakupannya belum sepenuhnya dapat mempresentasikan terselenggaranya ibadah haji secara peripurna (professional).

Adapun hukum menunaikan ibadah haji adalah wajib bagi setiap orang lelaki dan perempuan sekali seumur hidup dengan syarat–syarat tertentu. Haji adalah sesuatu kemestrian di dalam agama. Barang siapa yang mengingkarinya

boleh jatuh kepada hukum kafir menurut kesepakatan ulama. Haji adalah sebaik-baiknya amal yang dapat membersihkan diri dari kejahatan nafsu dan kecintaan kepada shwat, meninggikan mahabbahya dan haji Allah akan menjauhkannya dari perbuatan yang tercela dan menjauhkannya dari pada dosa.



BAB V

KESIMPULAN dan SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian terhadap hipotesis yang disusun sebagaimana telah dibahas dalam Bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 33 Provinsi di Indonesia. Tingginya daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam Indeks Pembangunan Manusia yang disebut indikator pendapatan.
2. Hasil pengujian dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk kesehatan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Artinya ketika Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Kesehatan meningkat maka tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia demikian sebaliknya pula.
3. Hasil pengujian dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk pendidikan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Artinya ketika Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Pendidikan meningkat maka tidak

berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia demikian sebaliknya.

4. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Keislaman mengalami signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Artinya Tingkat Keislaman (Ibadah Haji) meningkat maka berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia demikian sebaliknya pula.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah membuktikan secara empiris terkait pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Anggran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Kesehatan, Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Pendidikan, dan Tingkat Keislaman terhadap Indeks Pembangunan Manusia khususnya pada Provinsi–provinsi yang ada di Indonesia. Namun penelitian ini masih terhadap keterbatasan anantara lain sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel dan 1 variabel agama yang mencakup faktor – faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.
2. Penelitian ini mencoba menganalisis data–data yang ada di Badan Pusat Statistik untuk mendapatkan signifikan semuanya.
3. Objek penelitian terbatas pada Provinsi–provinsi di Indonesia sehingga kesimpulan yang diperoleh belum dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia di Povinsi–provinsi Indonesia.

5.3 Saran

5.3.1 Saran untuk Pemerintah

1. Pemerintah yang ada di Indonesia lebih memberikan perhatian terhadap APBD untuk Pendidikan dan untuk Kesehatan yang merata biar bisa dinikmati oleh kalangan bawah bukan hanya kalangan atas saja.
2. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia dalam Sumber Daya Manusia maupun Kesehatan dan Pendidikannya.

5.3.2 Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini baru menggunakan sebagian kecil dari komponen Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah, sehingga dalam penelitian selanjutnya diharap dapat menambah variabel lain dalam komponen Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk mengetahui peran pendanaan daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhakti, Nadia Ayu (2012) , “ Analisis Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia periode 2008 – 2012”, Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jendral Soedirman
- Arif, Rahman (2015), “Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji “, Diakses 25 September 2015, <http://www.sang-pencerah.com/2013/09/problematika-penyelenggaraan-ibadah-haji.html>
- Winarti, Astri (2014) “ Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992 – 2012” Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponogoro. Semarang.
- Maryani, Tri (2014),” Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah”, Diambil 10 Desember 2016, dari <http://www.analisis-indeks-pembangunan-manusia-di-provinsi-jawa-tengah.html>
- Sulaksono, Agus (2007) “Analisis Produk domestik Regional Bruto, Investasi, Tenaga Kerja Sektor Pertambangan terhadap Tingkat Kemiskinan diIndonesia”, diambil 10 Desember 2016 dari <Http://www.analisis-produk-domestik-regional-bruto-investasi-tenaga-kerja-sektor-pertambangan-terhadap-tingkat-kemiskinan-di-indonesia.html>.
- Cholili, Fatkhul Mufid (2014) “Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional(PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin (studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia”, Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasi) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.
- Permana, Anggita Yoga (2012) “Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2004 – 2009”, Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas di Ponogoro.Semarang.
- Girsang, Beryl Artesian (2014) “Alokasi Anggaran Daerah dalam Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota di provinsi sumatera Utara 2001 – 2009)” diambil 15 Desember 2016, dari <http://www.alokasi-daerah-dalam-pembangunan-manusia-kabupaten/-kota-di-provinsi-sumtera-utara-2001-2009.html>.

- Astri, M, S. Nikensari, dan Kuncara (2013). “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”, Jurnal Pendidikan ekonomi dan Bisnis 1(1):77-102.
- Badan Pusat Statistik (2011).” Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2011 – 2015”. BPS – Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (2006). “PDRB provinsi-provinsi menurut Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2011-2015”, BPS – Statistics Indonesia, 2012.
- Sensus Jumlah Haji yang Berangkat ke Tanah Suci Mekahtahun 2011 – 2015. BPS Indonesia
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2012). APBD Realisasi. <http://www.dipk.kemenkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/setalah-ta-2006> . Diakses 24 Agustus 2014. Jakarta. 2012. Susenas APBD untuk Kesehatan tahun 2011 - 2015.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Indonesia. 2012. sensus APBD untuk Pendidikan tahun 2011 -2015. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Indonesia.
- Gujarati, D. N. (2013)”Dasar – dasar Ekonometrika”, Salemba Empat. Jakarta.
- Kuncoro, M (2010)” Ekonomika Pembangunan”, Erlangga, Jakarta.
- Sen,A (1999) “Development as freedom 1st ed. Oxford University press, New York.
- Todaro, M (2006) “Pembangunan Ekonomi”, Erlangga, Jakarta. UNDP, (1990) “Human Development Report 1996 “ Oxford Univesity Press. New york.
- Widarjono, A (2009) “Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya” Ekonisia. Yogyakarta.
- Andaiyani, (2012) “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Operasional terhadap Jumlah Alokasi Belanja pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat”. Ringkasan Thesis. Pontianak. Program Pascasarjana Universitas Tanjungpura.
- BPS–Bappenas–UNDP, (2001) “Indonesia Human Development Report 2001; Democracy and Human development in Indonesia”. Jakarta; BPS–statistics Indonesia, Bappenas dan UNDP Indonesia. Ensiklopedia bebas, (2011), Jam 22.12 [https://id.wikipedia.org/wiki/Islam Sayyid Mujtaba Musawi Lari](https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_Sayyid_Mujtaba_Musawi_Lari), *Meraih Kesempurnaan Spiritual*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997.

- Al – Asy' Ari Adnan Hakim Al Quran dan terjemahannya, Depag RI, 1992
<http://sainsekonmi37.blogspot.co.id/2017/01/analisis-faktor-faktor-yang.html>. jam 22.24. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Haluoleo*
- Wahyudi, M. S. 2010. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka kemiskinan di Indonesia. Malang. Univesitas Brawijaya.
- Thamrin Simanjuntak 2001. Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yoyakarta: penerbit upp amp YKPn.
- Hadi sasana 2001."Produk Domestik Bruto dan Strukturanya". Diklat Teknis Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Oktober-November'. Semarang
- Sukirno,S.2000. Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynes Baru. PT Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.
- Gujarati.2004. Basic Econometrics. Newyork: Mcgraw-Hill.

